



**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DI DESA
SUMBER LESUNG KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

**Chandra Mukti
NIM 080910291017**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DI DESA
SUMBER LESUNG KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Oleh

Chandra Mukti
NIM 080910291017

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahim, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Imam Gusaeri dan Ibunda Murni Kasben yang telah membesarkan, mendidik serata senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dengan ketulusan yang tiada pernah kering akan doa, nasehat dan motivasi. Segala ucapan terimakasih tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan penghargaan ini.
2. Kakakku, Aang Agustin, Uly Wulandari, S.E., Oky Indriawan yang telah menyuntik semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Adikku, Fachmi dwiyan yang telah memberikan dukungan doa.
4. Guru-guruku dari TK, SD, SMP, SMA, serta Perguruan Tinggi.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negari Jember.

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(terjemahan Surat *Al-Mujadalah* ayat 11)^{*)}

Berdayakan Kredit Usaha Rakyat, Tingkatkan Kesejahteraan.^{**)}

^{*)} Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang:PT Kumudasmoro Grafindo.

^{**)} Susilo Bambang Yudhoyono (2007). Departemen Kementrian Komunikasi Dan Informatika, 2007. *Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta. Departemen Kementrian Komunikasi dan Informatika

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Chandra Mukti

NIM : 080910291017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DI DESA SUMBER LESUNG KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah ada saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 April 2015

Yang menyatakan

Chandra Mukti

NIM 080910291017

SKRIPSI

**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DI DESA
SUMBER LESUNG KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN
JEMBER**

Oleh

Chandra Mukti
NIM 080910291017

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dr. Sutomo, M.Si.

Dosen Pembimbing II : Suji, S.Sos, M.Si.

RINGKASAN

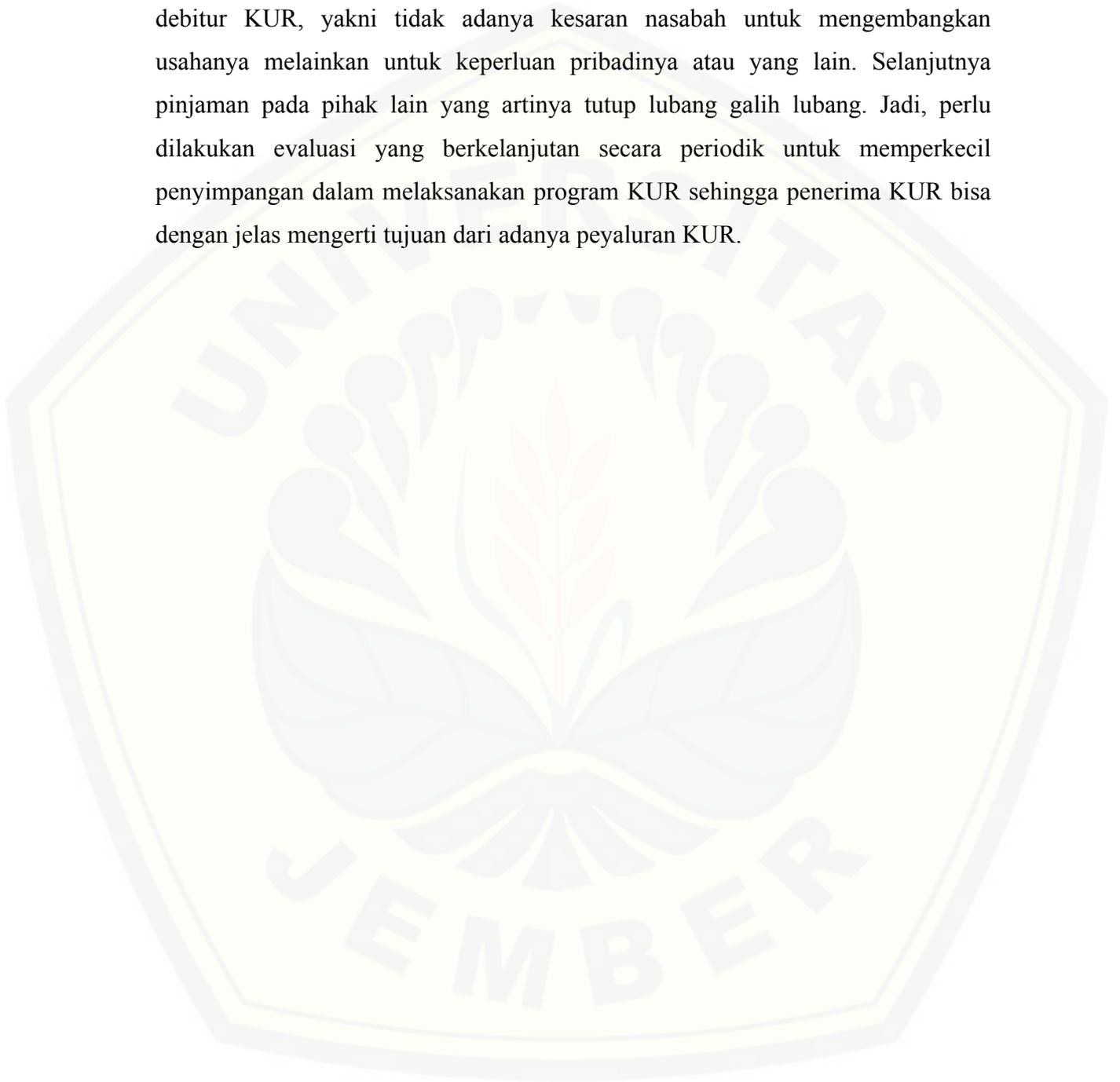
Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember; Chandra Mukti, 080910291017; 2015: 84 Halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Evaluasi ditujukan untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan serta mengetahui apakah telah meraih dampak yang diinginkan, baik dampak positif maupun negatif. Program KUR merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Program KUR bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Pertama, mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Kedua, Meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan UMKMK dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan. Ketiga, sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Penelitian ini berlokasi di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi terstruktur atau tersamar, wawancara tak berstruktur, dokumentasi, serta melakukan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terbagi dalam tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pendistribusian KUR dapat dikatakan kurang tepat sasaran karena penyaluran KUR menghasilkan dampak

negatif. Adapun dampak positifnya yaitu Dana KUR tetap digunakan sebagai modal kerja dan investasi. Selanjutnya proses untuk mendapatkan KUR juga mudah dan cepat. Penyaluran KUR ini juga mempunyai dampak negatif bagi para debitur KUR, yakni tidak adanya keseran nasabah untuk mengembangkan usahanya melainkan untuk keperluan pribadinya atau yang lain. Selanjutnya pinjaman pada pihak lain yang artinya tutup lubang galih lubang. Jadi, perlu dilakukan evaluasi yang berkelanjutan secara periodik untuk memperkecil penyimpangan dalam melaksanakan program KUR sehingga penerima KUR bisa dengan jelas mengerti tujuan dari adanya peyaluran KUR.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan segala kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”. Sholawat dan salam tak lupa penulis lantunkan bagi Rasulullah SAW, manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini yang selalu menjadi sumber inspirasi penulis untuk selalu menjadi lebih baik di berbagai hal, sahabat Rasulullah, keluarga, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar S.Sos pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Dra. Inti Wasiati, MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Sutomo, M.Si dan Suji, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dengan sabar guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi.
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan segenap ilmu dan pengetahuannya selama penulis belajar di Jurusan ini.

8. Pak Samsul selaku Kepala BRI Unit Ledokombo yang senantiasa membantu peneliti dalam proses penelitian di lapangan dan turut mendukung dalam kelancaran penelitian ini.
9. Arif E. S., Yuniar Dian, Siti Julaiha, Lutfi Indra P, Rizka W. S., Sella D. S., Indah R. A., Rudy A., Siti Nur Afifah, Galih Mahardika, Irfan, Kaharudin Syah, Masruhen, Tri Andi P, Okky Novianto, Kim, Didik S., Mas Max, Deva gautama teman yang tiada duanya selalu memberi kegembiraan, semangat, dan motivasi. *You're all the best, guys!*
10. Rekan-rekan Administrasi Negara khususnya angkatan 2008 yang selalu menemani di saat senang ataupun susah. *Thank you for being my best friends ever.*
11. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 21 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Dasar	10
2.2 Konsep Pembangunan	11
2.3 Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia	13
2.4 Konsep Kebijakan Publik	15
2.4.1 Jenis-jenis Kebijakan	17
2.4.2 Tahap-tahap Kebijakan	18
2.5 Konsep Evaluasi Kebijakan	19
2.5.1 Tipe Evaluasi Kebijakan Publik	24
2.6 Konsep Program Pemberdayaan Masyarakat	25
2.7 Konsep Program Kredit Usaha Rakyat	33

2.8 Konsep Evaluasi	39
2.9 Konsep Evaluasi Dampak Program	47
BAB 3. METODELOGI PENELITIAN	48
3.1 Fokus Penelitian	48
3.2 Tipe Penelitian	49
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	50
3.5 Penentuan Informan	53
3.6 Metode Analisis Data	54
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	56
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum	58
4.1.1 Kondisi Geografis	58
4.1.2 Mata Pencaharian	60
4.1.3 Pendidikan	60
4.1.4 Sarana dan Prasarana	61
4.1.5 Kualitas Angkatan Kerja	62
4.1.6 Kesejahteraan Penduduk	63
4.1.7 Struktur Organisasi Desa Sumber Lesung	63
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian	65
4.2.1 Kegiatan Pemberdayaan	65
4.2.2 Penyaluran KUR terhadap UMKM	65
4.2.3 Gambaran Penyaluran KUR	69
4.2.4 Dampak Penyaluran KUR	75
4.2.5 Volume Penjualan Para UMKM	79
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

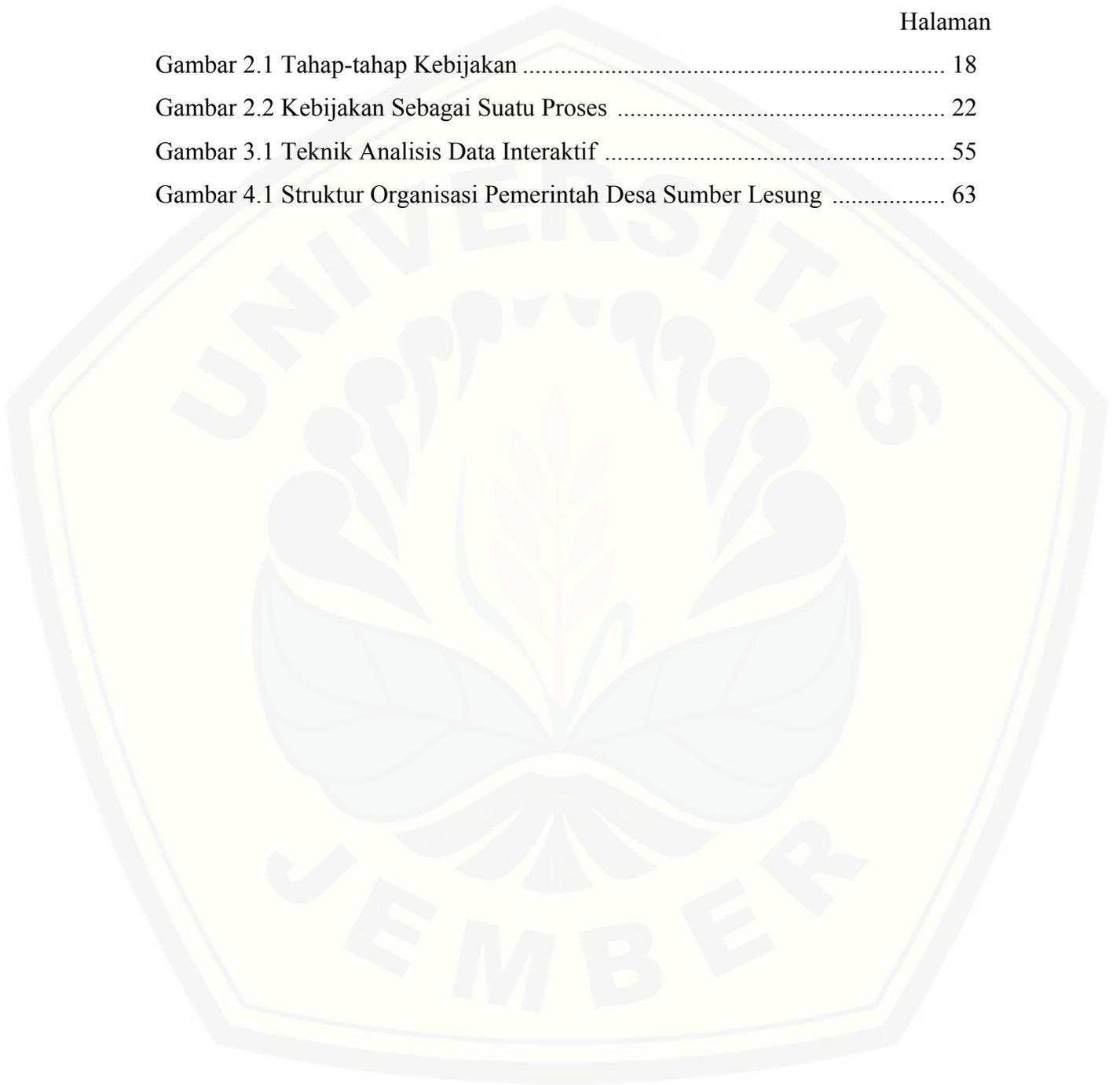


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Konsolidasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan	3
Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Kecamatan Ledokombo	6
Tabel 1.3 Banyaknya UMKM di Kecamatan Ledokombo	7
Tabel 4.1 Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumber Lesung	60
Tabel 4.2 Rincian Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Sumber Lesung	61
Tabel 4.3 Kesejahteraan Penduduk Desa Sumber Lesung	63
Tabel 4.4 Daftar UMKM Yang Mendapatkan KUR	66
Tabel 4.5 Angsuran Kredit Berdasarkan Plafon Kredit	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tahap-tahap Kebijakan	18
Gambar 2.2 Kebijakan Sebagai Suatu Proses	22
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Interaktif	55
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumber Lesung	63



DAFTAR LAMPIRAN

1. Instruksi Presiden No. 06 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.
3. Kumpulan peraturan terbaru Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
4. Tanya Jawab Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tentang Program Kredit Usaha Rakyat.
5. Foto-foto Wawancara.
6. Surat ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Surat ijin penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
8. Surat ijin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Jember.
9. Surat telah melaksanakan penelitian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Ledokombo Kantor Cabang Jember.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu isu sentral permasalahan di Indonesia sampai saat ini adalah masalah kemiskinan. Hal tersebut karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang penanganannya memerlukan berbagai pihak. Kemiskinan di Indonesia diiringi oleh masalah kesenjangan baik antar golongan penduduk maupun pembangunan antar wilayah, yang diantaranya ditunjukkan oleh buruknya kondisi pendidikan dan kesehatan serta rendahnya tingkat pendapatan dan daya beli. Oleh karenanya diperlukan cara yang sinergis dan sistematis dalam penanggulangan kemiskinan untuk menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi muda dan menjamin kelangsungan pembangunan dimasa mendatang.

Upaya penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan beserta segala penyebabnya. Upaya yang dimaksud tidak saja diarahkan untuk mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dalam rangka membangun semangat dan kemandirian masyarakat miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya sebagai pelaku dalam berbagai tahap pembangunan. Dalam konteks inilah, pendekatan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin menjadi sangat penting dan strategis mengingat jumlahnya yang relatif besar, sehingga berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja berbangsa dan bernegara.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh Pemerintah sejak tahun 1960an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Selanjutnya sejak krisis ekonomi pada 1997, pemerintah mengeluarkan program jaring pengaman social (JPS) yang dikordinasikan melalui Keppres Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial. Pelaksanaan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kendala pelaksanaannya hingga saat ini dianggap belum mencapai harapan dan penanggulangan kemiskinan tersebut dalam implementasinya kadang-kadang tumpang tindih satu sama lain serta kurang fokus dalam menetapkan sasaran

program, sehingga pemerintah terus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan tujuan tersebut, pada tahun 2010 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Strategi penanggulangan kemiskinan dilandasi atas pemahaman terhadap konsep pembangunan. Pembangunan menurut Sumodiningrat (2009:6) adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu. Berdasarkan definisi tersebut, sasaran pembangunan yang utama adalah manusia. Dengan perubahan struktur sebagai langkah operasional dan manusia sebagai sasaran, maka strategi penanggulangan kemiskinan yang paling tepat adalah pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2009:7) adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan secara terfokus sekaligus dapat menghindari penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan yang tidak produktif.

Pemerintah menjalankan fungsi sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat miskin ditempatkan sebagai pelaku usaha berskala mikro. Adapun perbankan dan dunia usaha diharapkan dapat menyediakan pembiayaan serta akses pemasaran. Kesenjangan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat miskin selaku sasaran dengan pemerintah dan perbankan serta dunia usaha dijumpai melalui tenaga pendamping yang berfungsi sebagai manajer sosial dan sekaligus penggerak pembangunan ditingkat lokal.

Saat ini strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan difokuskan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Konsolidasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

Jenis	Bentuk Program	Sasaran	Filosofi	Program
Klaster I	Bantuan dan Perlindungan Sosial	Diperuntukkan bagi mereka yang termasuk dalam kelas <i>the poorest of the poor</i> (rumah tangga sangat miskin)	kelompok masyarakat yang seperti ini di beri “ikan” agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.	Contohnya: PKH (Program Keluarga Harapan), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Raskin (Beras Miskin), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dll.
Klaster II	Pemberdayaan Masyarakat	Diperuntukkan kepada masyarakat miskin yang telah mendapatkan peningkatan, baik gizi, kesehatan, maupun pendidikan.	pada program ini masyarakat tidak diberi ikan melainkan pancing, dengan harapan mereka bisa mencari ikan sendiri.	Contohnya: PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri.
Klaster III	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kelompok-kelompok masyarakat yang telah ditingkatkan dan diberdayakan kemandiriannya.	pada program ini masyarakat di beri kail, jala, dan perahu.	Contohnya: Program Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sumber: sumodiningrat (2009:71)

Maka dari beragam upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bentuk program yang bertujuan untuk menaggulangi kemiskinan, Peneliti lebih tertarik terhadap program - program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha beskala mikro, kecil, dan menengah dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mengingat usaha mikro, kecil dan menengah saat ini bersaing dengan pasar – pasar modern yang bermodal besar seperti Indomaret dan Alfamart, dan kegagalan atau distorsi pasar yang membawa konsekuensi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sehingga dengan skema kredit atau pembiayaan modal kerja diharapkan masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bersaing, mengingat ketahanan ekonomi nasional sangat bergantung pada penguatan ekonomi mikro. Sebab, berdasarkan

data BPS tahun 2013 dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, kurang lebih 100 juta orang mengandalkan pendapatan dari sektor tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan iklim usaha, baik yang bersifat internal maupun eksternal, contohnya produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, serta permodalan.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang rancangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kebijakan yang ada belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 7 ayat 1 menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan dan perundang-undangan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasaran dll. Sementara ayat 2 menyatakan “Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif dalam pembangunan UMKM dalam hal ini dari segi permodalan dengan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM”.

Timbulnya permasalahan permodalan bagi usaha mikro membuat Pemerintah bekerja sama dengan beberapa Bank pelaksana untuk menggagas Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat pada tanggal 5 November 2007 dengan melibatkan 6 Bank Pelaksana yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan

Negara, Bank Mandiri, Bank Umum Koperasi Indonesia, dan Syariah Mandiri. Berdasarkan surat edaran NOSE.S.8-DIR/ADK/02/2008, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat pada tanggal 9 November 2007. jenis Kredit Usaha Rakyat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk terdiri dari Kredit Usaha Rakyat Mikro, Kredit Usaha Rakyat Ritel, Kredit Usaha Rakyat Linkage Program (Executing), Kredit Usaha Rakyat Linkage Program (Channelling). Selanjutnya, Kredit Usaha Rakyat dengan agunan dan tanpa agunan dikeluarkan pada bulan Maret 2008.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang berdasarkan Instruksi Presiden nomor 06 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian Kredit Usaha Rakyat adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable). Tujuan pelaksanaan program KUR ini adalah memberikan pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Dalam pelaksanaan program KUR terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu pertama adalah Pemerintah, Kedua adalah lembaga penjamin yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Ketiga adalah perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi (diakses dari [http://www.tnp2k.go.id/id/Tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/tanggal 3 September 2014](http://www.tnp2k.go.id/id/Tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/tanggal%203%20September%202014)).

Sebagaimana disebutkan dalam media on line Skalanews.com bahwa sampai Mei 2012, Bank Rakyat Indonesia menjadi Bank dengan kinerja penyaluran kredit terbaik dengan total Rp. 46,6 triliun dengan total debitur 7.066.998. Nilai tersebut jauh melebihi kinerja Bank Negara Indonesia yang berada di urutan ke dua dengan nilai penyaluran kredit sebesar Rp 8,1 triliun dengan total debitur yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat sebanyak 1.591.636.

(diakses dari <http://skalanews.com/news/detail/120352/5/presiden-targetkan-10-juta-umkm-penerima-kur.html>/tanggal 4 September 2014).

Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah satu-satu Bank yang memiliki Unit hingga ke Kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di Kabupaten Jember, maka dari itu untuk memperluas dan memberikan kemudahan bagi umkm yang mengajukan KUR, pada tahun 2011 BRI membuka Unit BRI di Kecamatan Ledokombo. Kemudian sejak dibukannya unit BRI di Ledokombo, umkm yang sebelumnya mengajukan KUR di Unit BRI Kalisat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk pergi ke BRI Unit Kalisat. Berdasarkan hal tersebut, maka sejak tahun 2011 umkm yang mengajukan KUR di BRI Unit Ledokombo mengalami peningkatan. Seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Di Kecamatan Ledokombo

No	Tahun	Jumlah
1.	2011	101 umkm
2.	2012	249 umkm
3.	2013	449 umkm
4.	2014	461 umkm

Sumber: diolah dari data primer BRI Unit Ledokombo

Berdasarkan Tabel di atas, umkm yang mengajukan KUR di BRI Unit Ledokombo pada Tahun 2011 sebanyak 101 orang, kemudian pada Tahun 2012 sebanyak 249 orang, jumlah itu meningkat sebanyak 148 orang dari tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2013 umkm yang mengajukan KUR sebanyak 449 orang, jumlah itu meningkat sebanyak 200 orang dari tahun 2012.

Selanjutnya peneliti lebih memfokuskan penelitian di Desa Sumber Lesung, di karenakan jumlah umkm yang mengajukan KUR terbanyak di Kecamatan Ledokombo berada di Desa Sumber Lesung seperti pada tabel berikut.

Tabel. 1.3 Banyaknya UMKM Menurut Desa Di Kecamatan Ledokombo

No.	Desa	2011	2012	2013	2014
1.	Suren	12	29	52	54
2.	Sumber Salak	9	22	40	41
3.	Sumber Bulus	11	27	49	50
4.	Sumber Lesung	15	37	67	69
5.	Lembengan	14	35	63	65
6.	Sumber Anget	7	17	31	32
7.	Ledokombo	8	20	36	36
8.	Slateng	11	27	49	51
9.	Sukogidri	6	16	28	29
10.	Karang paiton	8	19	34	34
	Jumlah	101	249	449	461

Sumber: diolah dari data primer BRI unit Ledokombo

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 Desa Sumber Lesung menempati urutan pertama dengan banyaknya umkm yaitu 69 umkm. Sedangkan Desa Lembengan memiliki jumlah umkm tertinggi ke dua setelah Desa Sumber Lesung yaitu sebanyak 65 umkm. Desa Suren menempati posisi ketiga tertinggi dengan jumlah 54 umkm. Desa Slateng memiliki jumlah umkm tertinggi keempat dengan jumlah 51 umkm. Selanjutnya Desa Sumber Bulus menempati tertinggi kelima yaitu sebanyak 50 umkm. Selanjutnya Desa Sumber Salak menempati posisi keenam yaitu sebanyak 41 umkm. selanjutnya Desa Ledokombo menempati posisi ketujuh yaitu sebanyak 36 umkm. Selanjutnya Desa Karangpaiton menempati posisi kedelapan yaitu sebanyak 34 umkm. Selanjutnya Desa Sumber Anget menempati posisi kesembilan yaitu sebanyak 32 umkm. Selanjutnya Desa Sukogidri menempati posisi kesepuluh dengan jumlah umkm yaitu sebanyak 29 umkm.

Selanjutnya, KUR selama keberlangsungannya telah menunjukkan peningkatan penyalurannya. Sebagaimana dilansir dari penjelasan presiden Yudhoyono dalam media on line skalanews.com (diakses tanggal 4 september 2014), Total penyaluran KUR kepada UMKMK sampai saat ini sudah mencapai Rp82 triliun, dan yang mengalami kemacetan hanya sekitar 4%. Ia juga mengatakan bahwa KUR sebagai program pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kecil sejak 2007 sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Mengacu pada penjelasan tersebut, program KUR hingga saat ini sudah berjalan selama 6 tahun. Sehingga, telah dapat dinilai dampak dari KUR itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember” dimana program KUR ini merupakan salah satu program yang perlu dikaji lebih lanjut sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali guna memaksimalkan program yang di tujukan untuk penanggulangan kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan dicapai dari perumusan masalah yang ditentukan. Tujuan dimaksudkan agar peneliti mempunyai arah yang jelas. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Desa Sumber Lesung kecamatan Ledokombo.”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat Akademis

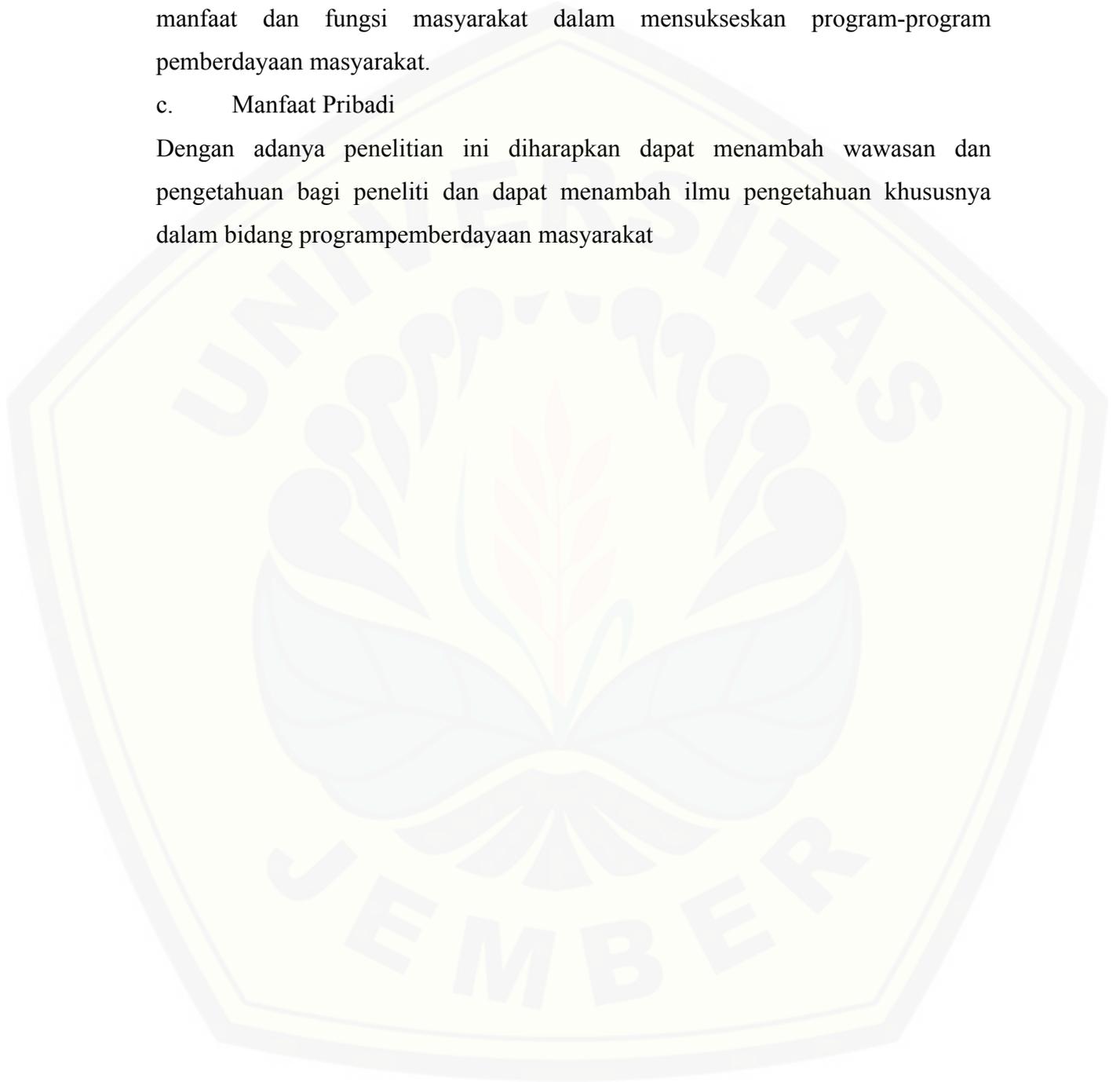
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca, sehingga dapat dijadikan referensi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi sekaligus memberikan masukan bagi pelaksanaan program untuk dapat mengetahui secara jelas tujuan, manfaat dan fungsi masyarakat dalam mensukseskan program-program pemberdayaan masyarakat.

c. Manfaat Pribadi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang program pemberdayaan masyarakat



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Suatu penelitian ilmiah haruslah terdapat serangkaian konsep yang digunakan untuk menyederhanakan pemikiran dengan menguraikan beberapa kejadian yang saling berkaitan. Konsep diperlukan untuk membatasi pemikiran peneliti agar tidak melebar dan lebih terfokus pada teori apa yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang telah ditentukan. Berkaitan dengan hal tersebut Singarimbun dan Effendi (1995:3) mengungkapkan pendapatnya mengenai konsep sebagai berikut.

“konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events), yang berkaitan satu dengan lainnya”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dalam suatu penelitian konsepsi dasar merupakan alat yang dapat diterjemahkan sebagai pedoman secara umum dalam menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dalam objek penelitian. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Konsep Pembangunan;
2. Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Konsep Kebijakan Publik;
4. Konsep Evaluasi Kebijakan;
5. Konsep Program Pemberdayaan Masyarakat;
6. Konsep Program Kredit Usaha Rakyat;
7. konsep Evaluasi;
8. Konsep Evaluasi Dampak Program;

2.2 Konsep Pembangunan

Suhartono (2010:1) sebagai suatu perubahan terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut.

Dalam pembangunan harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, pendekatan sosial perlu diterapkan bersamaan dengan pendekatan ekonomi dalam strategi pembangunan. Conyers dan Hills (dalam Suhartono, 2010:3) pembangunan bisa diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan. Todaro (dalam Suhartono, 2010:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait:

1. meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat;
2. mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan;
3. memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Suhartono (2010:5) satu perspektif pembangunan yang kini tengah populer dan menjawab tantangan di atas adalah konsepsi pembangunan sosial. Paham pembangunan baru ini berupaya mencari titik kesinambungan optimal (*optimum trade-off*) antara kepentingan ekonomi dan sosial menuju pembangunan yang humanistik, partisipatif dan memperhatikan mata pemberdayaan

manusia. Konsepsi mengenai pembangunan sosial muncul sebagai kritik atas kekurangan model-model pembangunan konvensional, baik yang sosialis maupun yang kapitalis, yang begitu memusatkan perhatian pada produksi dan industri padat modal. Dengan mengabaikan prinsip keadilan sosial, pendekatan pembangunan konvensional kurang memiliki perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan kelompok lemah. Secara ringkas, pembangunan sosial adalah sebuah strategi pembangunan yang pro-kerakyatan, anti kemiskinan dan anti kesenjangan.

Menurut Hardiman dan Midgley (dalam Suhartono, 2010:5) model pembangunan sosial menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal, yakni peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui:

1. menumbuhkembangkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja;
2. menyediakan dan memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan serta pelayanan yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Mengacu pada Conyers (dalam Suhartono, 2010:6) ada tiga karakteristik utama pembangunan sosial, yaitu pemberian pelayanan sosial, pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

1. Pembangunan sosial sebagai pemberian pelayanan sosial yang mencakup program nutrisi, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya secara keseluruhan memberikan kontribusi kepada perbaikan standar hidup masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan sosial dalam konotasi ini antara lain adalah angka harapan hidup, angka kematian bayi, morbiditas, angka kemampuan membaca dan menulis, dan sebagainya. Dalam pengertian ini

pembangunan sosial berorientasi pada kesejahteraan (*welfare oriented*).

2. Pembangunan sosial sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan sosial, keamanan dan ketentraman hidup, kemandirian keluarga dan masyarakat (*self-reliance*), harga diri (*self-esteem*), kebebasan dari dominasi (*liberation*), hidup sederhana (*plain living*).
3. Pembangunan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengaktualisasikan diri mereka. Dalam kaitan ini pembangunan sosial terkait dengan upaya pemberdayaan (*empowerment*).

Dalam menunjang pembangunan sosial banyak hal yang kini di usahakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan memberikan keterampilan dan bekal agar masyarakat mampu berdikari. Pemberdayaan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, mulai aspek pendidikan maupun keterampilan. Pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menunjang pembangunan sosial memiliki banyak program pemberdayaan. Salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat melalui bentuk program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan sasaran kelompok-kelompok masyarakat yang telah ditingkatkan dan diberdayakan kemandiriannya dengan program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga mampu meningkatkan taraf kesejahteraan.

2.3 Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting bagi pembangunan, dimana mereka dituntut untuk terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Menurut Simanjuntak (1998:1), sumber daya manusia atau human resources mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.
2. SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari kedua pengertian SDM tersebut mengandung aspek kuantitas dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja, dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi (Simanjuntak, 1998:1). Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara jumlah penduduk yang mampu bekerja dengan jasa yang tersedia. Di Indonesia jumlah penduduk yang mencari kerja lebih banyak apabila dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada, sehingga masyarakat sebisa mungkin tidak hanya menanti kesempatan kerja tetapi juga membuka lapangan pekerjaan sehingga membuka kesempatan kerja bagi orang lain.

Menurut Notoatmodjo (2003:2), masalah sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). Selanjutnya, kualitas sumber daya ini juga menyangkut pada dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan – keterampilan lain.

Untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yaitu dengan adanya pengembangan sumber daya manusia baik secara mikro dan makro. Menurut Notoatmodjo(1998:2-3) pengembangan sumber daya manusia secara makro, adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka

mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan disini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil optimal.

Untuk mengembangkan masyarakat agar terampil dan berkualitas maka pengembangan secara makro yang lebih tepat, karena diharapkan hasilnya masyarakat mampu mengolah atau mengelola SDA, menguasai teknologi, megkreasikan produk, mampu memasarkan produk, melatih orang lain, membuka usaha sendiri sehingga bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat lain. Untuk pengembangan sumber daya manusia di Desa Sumber lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

2.4 Konsep Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik diakui memang sukar, beberapa ahli teori administrasi publik lebih suka menghindari perbincangan mengenai definisi. Sebaliknya, mereka lebih banyak memberikan perhatian pada esensi yang terkandung pada pengertian kebijakan publik. Thomas R. Dye (dalam Santosa, 2012:27) merumuskan kebijakan publik sebagai “pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak”. David Easton (dalam Santosa, 2012:27) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. Definisi Easton ini mensyaratkan sifat otoritatif dalam proses alokasi. Tetapi dalam kenyataannya, hanya pemerintah yang dapat bertindak secara otoritatif kepada seluruh masyarakat, apa pun yang dipilih pemerintah, baik bertindak maupun tidak bertindak terungkap dalam alokasi nilai.

James E. Anderson (dalam Subarsono, 2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Menurut Subarsono (2005:2) kebijakan

publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

Carl Friedrich (dalam Winarno, 2007:17) memandang kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi yang diberikan Friedrich ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Thomas R. Dye (dalam Santosa, 2012:28) mengatakan bahwa kebijakan publik mempunyai empat sifat; regulatif, organisasional, distributif, dan ekstraktif. Dengan demikian, liputan kebijakan publik begitu luas. Kebijakan publik berkenaan pula dengan urusan pokok bagi Negara, seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, penyediaan bahan pangan, pengembangan system politik, pembangunan kota dan daerah. Kebijakan publik juga bergerak dari hal vital sampai hal tidak vital. Analisis dan studi kebijakan publik menurut Dye pada umumnya melibatkan lima hal berikut.

1. Distribusi materi-materi yang dikandung dalam kebijakan publik.
2. Penilaian dampak kekuatan lingkungan terhadap isi kebijakan publik.
3. Analisis efek pengaturan institusional yang terjadi dalam proses politik dalam kebijakan publik.
4. Konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik terhadap skstem politik.
5. Evaluasi dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak.

2.4.1 Jenis-Jenis Kebijakan

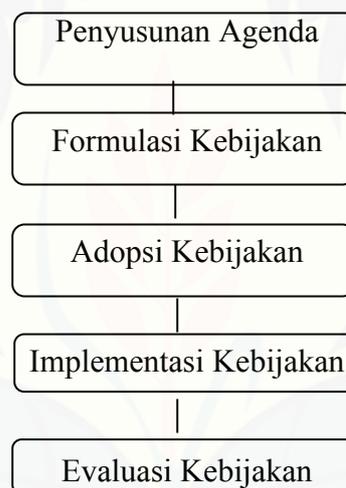
Jenis-jenis kebijakan dapat dibagi dalam beberapa kategori. Anderson (dalam Subarsono, 2005:19-21) mengemukakan kategori-kategori berikut.

1. Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan pemerintah, seperti contohnya kebijakan Kredit Usaha Rakyat. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dilaksanakan. Misalnya, kebijakan yang berisi kriteria orang tersebut dan bagaimana prosedur memperolehnya.
2. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu, seperti contohnya kebijakan obat generik. Sedangkan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Misalnya kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat, seperti contohnya kebijakan pajak progresif.
3. Kebijakan material vs kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumberdaya konkrit pada sekelompok sasaran, misalnya kebijakan Kredit Usaha Rakyat. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada sekelompok sasaran, misalnya kebijakan libur Idul Fitri dan libur hari Natal.
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang publik dan barang privat. Kebijakan barang publik adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, misalnya kebijakan membangun jalan raya. Sedangkan kebijakan yang berhubungan dengan barang privat adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas, misalnya parkir umum.

Dalam konteks penelitian ini, program Kredit Usaha Rakyat termasuk ke dalam jenis kebijakan Substantif dan kebijakan prosedural. Dimana salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di dalamnya termuat bagaimana kriteria orang tersebut dan bagaimana prosedur memperolehnya.

2.4.2 Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut Winarno (2007:32) proses kebijakan publik dapat dibagi menjadi 5 (lima) tahapan sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Tahap-tahap kebijakan menurut Winarno (2007:33)

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-cacatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

5. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.5 Konsep Evaluasi Kebijakan

Dalam Wirawan (2011:17) dijelaskan bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi untuk menentukan apakah kebijakan bermanfaat, dapat mencapai tujuannya, dilaksanakan secara efisien, dan untuk pertanggungjawaban

pelaksanaannya. Sehingga evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

Selanjutnya adapun pengertian evaluasi menurut beberapa ahli, antara lain. menurut Subarsono (2005:119) adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2007:226) Evaluasi Kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Jones (dalam Winarno, 2007:226) Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2007:226) Evaluasi Kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas yang kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak. Sedangkan tugas yang kedua dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkaitan erat dengan tugas yang pertama. Weiss (dalam Widodo, 2007:114) menyatakan riset evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan program dan perbaikan program pada masa mendatang.

Sebagai suatu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dijalankan setelah penetapan dan implementasi kebijakan. Tetapi evaluasi seharusnya dilakukan sepanjang proses kebijakan. Evaluasi kebijakan juga diperlukan pada waktu merumuskan alternatif-alternatif kebijakan, misalnya meramalkan dampak yang timbul dari masalah yang akan ditangani. Anderson (dalam Santosa, 2012:45) evaluasi dapat merupakan awalan (*restart*) dalam proses kebijakan. Karena itu, evaluasi dapat memberikan pedoman untuk mengubah atau menghapuskan suatu kebijakan.

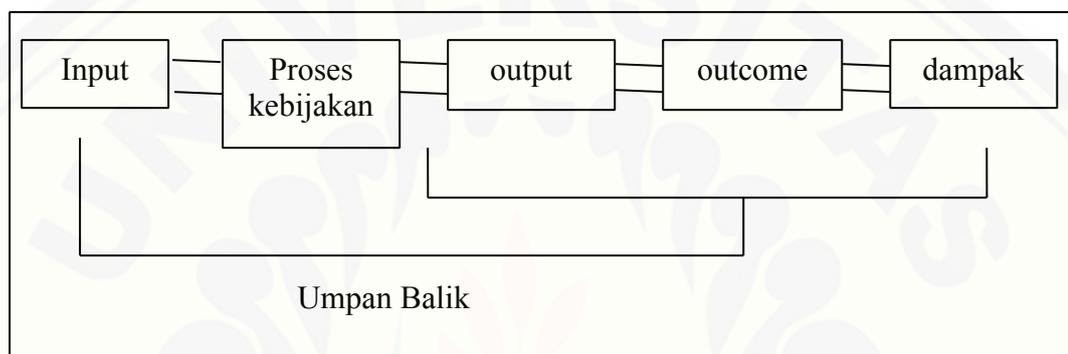
Dalam Wirawan (2011:22) disebutkan evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan obyek evaluasinya. Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain adalah:

- a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat;
- b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;
- c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar;
- d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan;
- e. Pengembangan staf program;
- f. Memenuhi ketentuan undang-undang;
- g. Akreditasi program;
- h. Mengukur cost effectiveness dan cost efficiency;
- i. Mengambil keputusan mengenai program;
- j. Accountabilitas;
- k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program;
- l. Memperkuat posisi politik;
- m. Mengembangkan ilmu evaluasi dan riset evaluasi.

Menurut Subarsono (2005:120-121) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dirinci sebagai berikut.

- a. Menemukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.

- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.



Gambar 2.2 kebijakan sebagai suatu proses menurut Subarsono (2005:121)

Berdasarkan gambar diatas, yang dimaksud dengan.

- a. input adalah bahan baku (*raw materials*) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, tuntutan-tuntutan, dukungan masyarakat.
- b. Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayan jasa, dan program.
- c. Outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan, sedangkan
- d. dampak (*impact*) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Evaluasi sangat penting dilakukan karena dengan evaluasi kebijakan-kebijakan kedepan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikut ini beberapa argumen perlunya evaluasi menurut Subarsono (2005:123).

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
4. Menunjukkan pada *stakeholders* manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan. Para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi menurut Dunn (dalam Subarsono, 2005:124), yakni: pertama, evaluasi semu yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan suatu yang terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversional.

Kedua, evaluasi formal adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah

bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.

Ketiga, evaluasi proses keputusan teoritis adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit digunakan oleh berbagai *stakeholders*. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para *stakeholders*.

2.5.1 Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Anderson (dalam Winarno, 2007:227) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe, yakni.

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakana dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan selalu membuat pertimbangan mengenai kebijakan-kebijakan, program-program, dan proyek-proyek. Pertimbangan ini memberi kesan bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi ideologi, kepentingan para pendukung, dan kriteria lainnya.
2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Pada evaluasi seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun, tipe evaluasi ini mempunyai kelemahan, yakni kecenderungan untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.
3. Evaluasi kebijakan sistematis. Tipe evaluasi ini melihat secara efektif program-program yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan.

Berdasarkan tipe evaluasi di atas, penulis menggunakan tipe evaluasi ketiga yaitu tipe evaluasi kebijakan sistematis. Karena tipe evaluasi ini melihat secara obyektif program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Tipe evaluasi ini diarahkan untuk melihat dampak atau hasil dari suatu kebijakan itu untuk menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

2.6 Konsep Program Pemberdayaan Masyarakat

Hasil dari pengembangan sumber daya manusia adalah masyarakat yang berdaya. Menurut Mardikanto dan Purwoko (2012:61), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Selanjutnya, Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu – individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Kartasmita (dalam Mardikanto dan Purwoko, 2012:163) menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai obyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

- a. Upaya itu harus terarah (*targeted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang menerima manfaat, mempunyai

beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

- c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri – sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah – masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan yang menjadi terlalu luas kalau penaganannya dilakukan secara individu, karena itu seperti telah disinggung dimuka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Disamping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

Dalam penerapan pendekatan pemberdayaan, dapat dilakukan melalui 5P yaitu (Suharto (2005)):

- a. Pemungkinan
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat – sekarat cultural dan struktur yang menghambat.
- b. Penguatan
Memperkuat pegetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan
Melindungi masyarakat terutama kelompok – kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat terhadap kelompok kuat dan lemah,

dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas – tugas kehiduannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setia orang memperoleh kesempatan berusaha.

Adapun kompetensi atau kemampuan yang diwujudkan dalam pengetahuan dan keterampilan serta ditunjang oleh sikapnya yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan dalam beberapa dimensi sebagai berikut (Anwas, 2013:62).

1. Kompetensi pemahaman sasaran

Kompetensi dalam memahami potensi sasaran adalah kemampuan individu dalam mengidentifikasi sumber daya yang dapat dikembangkan sesuai tuntutan masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap sumber daya (alam, sosial, dan budaya) yang dimiliki sasaran terutama yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan dan kehidupan kearah yang lebih baik.

2. Kompetensi menumbuhkan kesadaran

Menumbuhkan kesadaran merupakan bagian inti dalam pemberdayaan masyarakat. Kompetensi ini diperlukan setelah agen pemberdayaan memahami karakteristik, potensi dan kebutuhan sasaran.

3. Kompetensi komunikasi inovasi

Dimensi komunikasi inovasi adalah kemampuan agen pemberdayaan dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kompetensi dan kehidupannya. Kompetensi ini mulai dari kemampuan dalam mencari informasi inovasi.

4. Kompetensi pengelolaan dan pembaharuan

Kompetensi pengelolaan dan pembaharuan dapat diartikan sebagai kemampuan agen pemberdayaan dalam memfasilitasi masyarakat agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang terus berubah. Kemampuan ini meliputi: (1) kemampuan membangkitkan motivasi untuk berubah, (2) kemampuan menumbuhkan kepekaan terhadap perubahan lingkungan, (3) kemampuan menerapkan teknologi atau ide – ide baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dilapangan.

5. Kompetensi pengelolaan pembelajaran

Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan agen pemberdayaan dalam menciptakan proses belajar kepada masyarakat dalam mengubah perilakunya yaitu meningkatkan kemampuan, kualitas hidup dan kesejahteraannya. Melalui belajar, masyarakat diharapkan mampu menguasai dan menerapkan inovasi yang lebih menguntungkan bagi diri dan keluarganya.

6. Kompetensi pengelolaan pelatihan

Dalam kehidupan di masyarakat seperti petani atau nelayan, kegiatan pelatihan, kursus tani, sekolah lapang, atau istilah sejenis lainnya merupakan aspek penting guna meningkatkan kemampuan mereka menuju peningkatan kualitas hidupnya. Dalam pemberdayaan

masyarakat, keragaman masyarakat akan memberikan banyak pilihan jenis – jenis pelatihan yang akan dilakukan. Dalam hal ini agen pemberdayaan perlu memberikan prioritas kebutuhan pelatihan yang memang diperlukan masyarakat. Indikator prioritas tersebut dapat dipertimbangkan dari kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya, kebutuhan untuk mengatasi masalah – masalah yang darurat atau, berbagai pertimbangan lainnya.

7. Kompetensi pengembangan kewirausahaan

Kemampuan mengembangkan kewirausahaan bagi agen pemberdayaan diantaranya kemampuan dalam: menanamkan sikap mental kepada masyarakat untuk berani mengambil resiko, mencari peluang, cara pandang (visi) terhadap perubahan, dan inisiatif untuk berubah.

8. Kompetensi pemandu sistem jaringan

Kegiatan pemberdayaan hendaknya diarahkan pada bentuk kewirausahaan dan kemandirian. Oleh karena itu pemberdayaan perlu menciptakan kerjasama atau jaringan dengan lembaga yang menangani produk – produk pengolahan dan pemasaran hasil serta pihak – pihak penyedia modal. Membangun jaringan ini dimulai dari membangun kelompok masyarakat yang bersinergi dengan pihak – pihak luar terkait lainnya

9. Kompetensi menumbuhkembangkan kelembagaan

Kompetensi agen pemberdayaan dalam menumbuhkan kelembagaan masyarakat meliputi: kemampuan dalam menguatkan atau kemampuan dalam membentuk kelembagaan yang belum ada tetapi diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya, mensinergikan kelembagaan yang telah ada, termasuk dengan kelembagaan yang baru terbentuk. serta membangun kerjasama kelembagaan yang ada di masyarakat dengan kelembagaan diluar masyarakat, dengan prinsip saling memahami, menghargai, dan saling menguntungkan.

10. Kompetensi pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu kemampuan yang sangat perlu dimiliki oleh agen pemberdayaan. Kemampuan yang harus dimiliki dalam aspek pendampingan meliputi: kemampuan memberikan motivasi untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, kemampuan dalam meningkatkan kesadaran bahwa masyarakat termasuk keluarga miskin memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk berubah dalam meningkatkan kualitas kehidupannya.

11. Kompetensi melek TIK

Teknologi informasi dan komunikasi telah merambah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu agen pemberdayaan dituntut untuk mampu melek teknologi ini dalam menunjang kelancaran kegiatan pemberdayaan. Melek informasi dan komunikasi bagi agen pemberdayaan dapat berfungsi mulai dari: mencari informasi yang berkembang sesuai kebutuhan pemberdayaan, sebagai media komunikasi baik dengan masyarakat maupun dengan pihak lain dalam mendukung kegiatan pemberdayaan, sebagai media pendidikan dalam menambah wawasan dan keterampilan. Sebagai media hiburan, memudahkan dalam melakukan kerjasama untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan, serta mencari dukungan partisipasi pihak – pihak luar yang mendukung kegiatan pemberdayaan.

12. Kompetensi mencari sponsorship

Untuk mensukseskan kegiatan pemberdayaan diperlukan dukungan sponsorship. Dukungan tersebut dalam pemberdayaan dapat berupa: tenaga, pemikiran/ide, fasilitas, kerjasama dan dukungan dalam bentuk finansial. Dukungan sponsorship atau dukungan dana untuk kegiatan pemberdayaan dapat diperoleh melalui organisasi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dunia usaha, yayasan, lembaga – lembaga donor, atau individu.

13. Kompetensi mempengaruhi media masa

Sebagai agen pemerdayaan, media massa penting untuk dipertimbangkan. Bagaimana mempengaruhi media massa untuk kegiatan pemberdayaan. Agen pemberdayaan dapat mengundang media massa dalam event pemberdayaan, membuat press release, atau melibatkan institusi media massa kedalam berbagai kegiatan pemberdayaan.

Dilihat dari 13 dimensi diatas peneliti memilih Kompetensi pengelolaan pelatihan, karena pelatihan merupakan aspek penting guna meningkatkan kemampuan masyarakat menuju peningkatan kualitas hidupnya dan juga semakin beragamnya masyarakat, maka akan memberikan banyak pilihan jenis-jenis pelatihan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana program pelatihan.

Selanjutnya Suharto (2005:59) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan yang berdaya, memiliki keuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomimaupun sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Sedangkan menurut Sumodiningrat (2009:7) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang memiliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. karena masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki relasi-relasi sosial maupun ekonomi, maka pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara bersama-sama.

Di dalam pemberdayaan masyarakat, faktor yang terpenting adalah bagaimana mendudukan masyarakat pada posisi sebagai pelaku pembangunan yang aktif, bukan hanya menerima atau sebagai yang pasif. Gerakan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan ide dan kreasi masyarakat dengan strategi adalah member kekuatan kepada masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus diberdayakan agar mampu untuk mengenali kebutuhan-kebutuhannya dan membuat rencana-rencana serta mampu untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya.

Adapun Indikator Pemberdayaan yaitu menurut Suharto (2005:63) keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*).

Dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat perlu ditentukan indikator untuk mengukur keberhasilan suatu program. Suatu program dianggap berhasil ketika telah mencapai indikator yang ditentukan dan sebaliknya program dianggap gagal ketika tidak mencapai indikator yang telah ditentukan. Dalam program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki indikator untuk mengukur seberapa berhasil program pemberdayaan masyarakat diadopsi dari maksud dan tujuan yang tertuang di penjelasan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagaimana diketahui pada tanggal 5 November 2007 yang dijelaskan Tim Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjamin kredit dari Pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo. adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Banks Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. KUR itu merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang

memiliki usaha yang layak namun belum *bankable*.UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan jasa keuangan simpan pinjam.

Selanjutnya, mengacu dari tujuan pelaksanaan KUR yang dikeluarkan Tim Nasional Pergerakan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tujuan Program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengetasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut.

- a. Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi sebagai lembaga keuangan
- c. Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan perluasan kesempatan kerja

Dari indikator tersebut maka dapat ditentukan bahwa program pemberdayaan melalui program penyaluran Kredit Usaha Rakyat berhasil dan sesuai harapan atau sebaliknya.

2.7 Konsep Program Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri.

1. Dasar Hukum KUR

- a. Instruksi Presiden No. 06 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.
- c. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

2. Penjelasan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Mengenai Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah:

1. Apa yang dimaksud Usaha, Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi?
 - a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,-(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasilpenjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-.
 - b. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memilikihasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-.

- c. **Usaha Menengah** adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-.
 - d. **Koperasi** adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asaskekeluargaan.
2. Persyaratan umum bagi UMKM untuk dapat menerima KUR?
Dokumen legalitas dan perizinan yang minimal ada pada saat debitur mengajukan KUR kepada Bank anantara lain:
 - a. Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dll.
 - b. Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan.
 - c. Perizinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili, dll.
 - d. Catatan pembukuan atau laporan keuangan
 - e. Salinan bukti anggunan.
 3. Cara UMKMK mendapatkan KUR dari Bank Pelaksana?
UMKMK dapat mendapatkan KUR dari Bank Pelaksana dengan cara sebagai berikut:
 - a. UMKMK mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya.
 - b. Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan permohonan UMKMK tersebut.

- c. Apabila menurut Bank usaha UMKMK layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.
 - d. Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
 - e. UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai Lunas.
4. Pengertian Program Kredit Usaha Rakyat.
- KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit. Lembaga penjaminnya adalah PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
5. Tujuan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:
- a. Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
 - b. Meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan UMKMK dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan.
 - c. Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
6. Sasaran Program KUR.
- Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk

memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

7. besarnya dana pinjaman (plafon) KUR yang dapat diperoleh UMKMK.

Plafon KUR yang dapat diperoleh UMKMK yaitu:

- a. KUR Mikro: KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- b. KUR Ritel: KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

8. Jangka waktu yang dapat diberikan atas fasilitas KUR yang diterima debitur. Kepada debitur KUR dapat diberikan jangka waktu fasilitas KUR maksimal selama 3 tahun untuk modal kerja dan maksimal lima tahun untuk investasi. pemberian penambahan plafon dapat dilakukan tanpa menunggu pinjaman dilunasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikatakan *bankable*.
- b. Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp. 5.000.000,- untuk KUR Mikro atau tidak melebihi sebesar Rp. 500.000.000,- untuk KUR Ritel atau tidak melebihi Rp. 1.000.000.000,- untuk KUR yang diberikan kepada lembaga *Linkage* dengan pola *executing*.
- c. Ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR melalui lembaga *Linkage*.

9. Besarnya suku bunga KUR.

Suku bunga KUR Mikro maksimal sebesar atau setara 22% efektif per tahun dan suku bunga KUR Ritel maksimal sebesar atau setara 14% efektif per tahun. selanjutnya, UMKMK tetap menyerahkan agunan kepada Bank berupa:

- a. Agunan pokok yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.
 - b. agunan tambahan sesuai dengan ketentuan pada Bank pelaksana, misalnya sertifikat tanah, BPKB mobil, dan lain sebagainya.
10. kewajiban debitur KUR dan konsekuensi jika UMKMK tidak memenuhi kewajiban KUR.
- debitur KUR memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Memenuhi persyaratan KUR yang ada pada Bank pelaksana.
 - b. Menyerahkan agunan kepada Bank.
 - c. Membayar kewajiban (pokok pinjaman dan bunga) atas KUR yang diterima sesuai *repayment* yang disepakati dengan Bank sampai kredit lunas.
 - d. Apabila debitur UMKMK tidak melunasi kewajiban KUR, maka:
 1. Bank pelaksana akan melakukan penjualan agunan dan apabila nilai penjualan agunan masih tidak mencukupi maka debitur masih wajib melunasi KUR.
 2. Terdaftar sebagai debitur *blacklist* Bank Indonesia.
11. Peranan Kementerian Teknis dalam penyaluran KUR dan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kementerian teknis untuk mewujudkan peranan itu.
- Kementerian Teknis mempunyai peranan dalam penyaluran KUR sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan UMKMK yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster yang dapat dibiayai dengan KUR.
 - b. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR.
 - c. Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa kredit/pembiayaan atau ketika usulan kredit/pembiayaan UMKMK ditolak oleh Bank pelaksana.

- d. Memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
- e. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:
 1. Menyiapkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR (penyiapan calon debitur KUR, pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan, serta penyediaan fasilitas dengan pihak lain, khususnya Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran UMKMK).
 2. Memasukkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR sesuai tupoksinya dalam Rancangan Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing dan mengusulkan penganggarnya.
 3. Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan perencanaan terkait pelaksanaan KUR dapat dirumuskan dalam SOP tersendiri oleh Kementerian

2.8 Konsep Evaluasi

Apabila suatu program telah dilaksanakan maka penting untuk dilakukan evaluasi untuk mengetahui dampak yang dihasilkan setelah program itu terlaksana. Malcolm, Provus, pencetus *Discrepancy Evaluation*, mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar yang mengetahui apakah ada selisih(dalam Tayibnapi, 2000:3). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menyatakan bahwa evaluasi adalah “ rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar (SOP) dari program yang akan di evaluasi.

Evaluasi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi formatif, evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk dan sebagainya). Fungsi sumatif, evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya

membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan duungan dari mereka yang terlibat (dalam Tayibnapis, 2000:4). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kegiatan evaluasi dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda yaitu:

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan
3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Menurut Zainal (2012:171), ada dua kelompok besar kegiatan dalam evaluasi. *Pertama*, evaluasi dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. *Kedua*, evaluasi terhadap berbagai kegiatan dalam proses kebijakan. Anggapan yang melandasi kedua kelompok besar evaluasi itu, antara lain (1) terdapat kemungkinan penyimpangan, (2) kekurangan atau ketidakcocokan antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai, (3) terdapat kemungkinan keberhasilan yang lebih baik dari yang biasa, dan diharapkan dapat menjadi contoh untuk kebijakan yang serupa di masa depan. Menurut Parsons

(2008:549) evaluasi memiliki 2 (dua) jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Evaluasi formatif: evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah program diimplementasikan” (Palumbo, 1987:40). Oleh karena itu, fase implementasi memerlukan evaluasi “formatif” yang memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Rossi dan Freeman dalam Parsons (2008:549) mendeskripsikan mode evaluasi ini sebagai evaluasi pada tiga persoalan:

- a. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat;
- b. Apakah penyampaian pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak; dan
- c. Sumber apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program.

Monitoring terhadap proses implementasi ini menjadi alat bagi pembuat kebijakan, stakeholders, dan manajer untuk mengevaluasi cara program disampaikan atau dilaksanakan, sehingga penyampaian kebijakan secara lebih efektif.

2. Evaluasi sumatif: dalam fase ini siklus kebijakan Palumbo (fase dampak), informasi evaluatif “sumatif” yakni. Yakni ia berusaha mengukur bagaimana kebijakan /program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya.

Adapun indikator utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua yaitu (Purwanto dan Dyah, 2012:105): indikator *output* dan indikator *outcome*. Indikator *output* digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi, dan lain – lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Indikator *outcome* yaitu untuk menilai hasil implementasi suatu kebijakan. Dalam berbagai literature, indikator *outcome* juga

disebut sebagai indikator dampak kebijakan (*policy impact*). Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti menimbulkan konsekuensi sebagai hasilnya. Ada dua konsekuensi dari suatu kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (dalam Samodra Wibawa, 1945:5) antara lain:

a. Output

Merupakan sesuatu yang diterima oleh kelompok masyarakat tertentu baik yang menjadi sasaran kebijakan maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan baik dalam bentuk barang, jasa, maupun fasilitas lain.

b. Dampak

Merupakan perubahan kondisi sebagai akibat dari output kebijakan baik perubahan kondisi fisik maupun kondisi social.

Hogwood (dalam Zainal, 2012:168) melihat evaluasi dalam hubungan dengan perubahan masyarakat yang diharapkan terjadi sebagai dampak suatu kebijakan. Dampak dari kebijakan itu tidak selalu sama seperti yang direncanakan semula. Ini berhubungan dengan ketidak pastian lingkungan dan kemampuan administrasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam praktek, selalu ada keterbatasan untuk memahami suatu isu secara utuh. Sementara itu, juga perlu disadari bahwa kebijakan tidak boleh merasa cukup berakhir pada selesainya implementasi saja karena sebelum ada evaluasi akhir terdapat dampak yang dihasilkan.

Peneliti memilih untuk evaluasi dampak karena peneliti ingin mengetahui dampak yang diterima oleh masyarakat setelah mengikuti program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso. Samodra Wibawa (1994:5) menguraikan dampak sebagai suatu perubahan kondisi fisik maupun social sebagai akibat dari output kebijakan. Selanjutnya, Samodra Wibawa (1994:54-60) menjelaskan tentang dampak kebijakan menurut unit – unit social antara lain:

a. Dampak individu

Yaitu dampak terhadap individu meliputi dampak yang menyentuh aspek – aspek biologis / fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi, social, serta personal. Dampak biologis / fisik, yaitu dampak yang menyangkut persoalan penyakit, cacat fisik dan kurang gizi. Sedangkan dampak psikis yaitu dampak yang berpengaruh pada jiwa seseorang dapat berupa cinta, emosi, stress, epercayaan diri dan lain – lain. Dampak lingkungan dapat dicontohkan dengan pindahnya seseorang dari lingkungan tertentu karena dilaksanakannya suatu kebijakan. Untuk dampak ekonomi tidak hanya mengenai para pekerja, tetapi juga konsumen dan pemilik modal, yaitu mengenai naik turunnya pendapatan, naik turunnya keuntungan dan naik turunnya harga dan kualitas barang. Dampak social serta personal dapat dicontohkan dengan kebebasan berpendapat, berkumpul, keamanan, dan lain – lain.

b. Dampak Organisasional

Merupakan suatu dampak terhadap organisasi atau kelompok yaitu mengenai seberapa jauh kebijakan membantu atau mengganggu pencapaian tujuan- tujuan organisasi. Dampak organisasional dari suatu kebijakan adalah seberapa jauh kebijakan tersebut membantu atau mengganggu pencapaian tujuan – tujuan suatu organisasi. Sementara itu, suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak tak langsung terhadap organisasi, misalnya melalui peningkatan semangat kerja para anggota organisasi.

c. Dampak Terhadap masyarakat

Dampak kebijakan terhadap masyarakat ini menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai input yang menyediakan sumber daya tetapi sekaligus menampung tuntutan, sedangkan kualitas hidup para anggotanya merupakan output. Sementara itu, yang menjadi proses atau konversi dalam system ini adalah kegiatan

yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengolah sumber daya guna memenuhi kebutuhan anggotanya.

d. Dampak terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Dampak terhadap lembaga dapat berupa perubahan bentuk lembaga, sedangkan terhadap system social berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat.

Dari penjabaran diatas mengenai dampak kebijakan menurut unit – unit social, peneliti memilih dampak individu. Karena pelatihan ini diikuti oleh individu – individu, sehingga dampak yang diterima setiap anggota pelatihan berbeda – beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Rossi dan Freeman (dalam Parsons 2008:604), penilaian dampak adalah untuk memeperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memeperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi-yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu.

Metodenya penilaian dampak, menurut Parsons (2008:604) antara lain sebagai berikut:

- a. Membandingkan problem / situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi.
- b. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkan dengan apa yang terjadi diarea atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi.
- c. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi.

- d. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu.
- e. Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program.
- f. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan.

Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi. Menurut Wirawan (2011:21), Evaluasi keluaran (*outcome*) merupakan evaluasi sumatif (*summative evaluation*) yaitu mengukur dan menilai keluaran dan akibat atau pengaruh dari program. Data yang dijarah antara lain mengenai.

1. Hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan yang direncanakan
2. Jumlah dan jenis orang yang dijalani apakah sesuai dengan yang direncanakan
3. Pengaruh atau akibat dari program terhadap orang yang mendapatkan layanan, apakah terjadi perubahan atau perbedaan dari sebelum dan sesudah mendapatkan layanan program
4. Evaluasi keluaran juga mengidentifikasi apa yang harus dilakukan agar pengaruh program dapat berlangsung secara terus - menerus.

Menurut Poister (dalam Mutrofin, 2005:80), berdasarkan asumsi bahwa criteria untuk riset terapan seperti riset kebijakan juga berlaku untuk riset evaluasi, maka sekurang – kurangnya terdapat enam kriteria utama yang dapat digunakan sebagai acuan untuk riset evaluasi. kriteria – kriteria yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

1. Effectiveness (efektifitas, keefektifan). kriteria ini berkaitan dengan apakah suatu program ataupun proyek mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan oleh program atau proyek. Pada umumnya efektivitas diukur berdasarkan unit produk, jasa layanan program atau nilai

moneternya karena secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis.

2. Efficiency (efisiensi). Riteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa banyak suatu usaha diperlukan guna mencapai hasil atau tujuan program dan proyek yang diharapkan. Jadi efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi yang juga seringkali ditentukan atau diukur dari ongkos moneter dan ditentukan melalui perhitungan iaya perunit produk atau layanan. Suatu program atau proyek dikatakan efisien apabila mencapai efektifitas sangat tinggi namun dengan menggunakan dana atau biaya yang paling rendah.
3. Adequacy (kecukupan). Kritea ini berhubungan dengan pertanyaan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan para pihak yang terlibat dalam program atau proyek dalam memecahkan suatu masalah. Criteria kecukupan lebih menekankan pada pola hubungan antara alternative desain program atau proyek dengan hasil tujuan yang diinginkan.
4. Equity (kesamaan atau perataan). Criteria kesamaan atau perataan merujuk pada kemampuan program atau proyek dalam menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang berbeda – beda. Jadi criteria ini berhuungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat atau hasil dan usaha secara adil.
5. Responsiveness (responsivitas). Kriteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh hasil suatu program atau proyek dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok – kelompok masyarakat tertentu. Empat kriteria terdahulu biasanya belum dipandang memuaskan apabila belum juga menyertakan kriteria responsivitas. Apakah PKPS-BBM benar – benar menjangkau kelompok miskin atau dinikmati sejumlah kelompok keluarga berkecukupan merupakan objek kriteria responsivitas. Termasuk

misalnya apakah skema program kredit tanpa agunan benar – benar menjangkau atau dinikmati oleh unit usaha kecil, menengah dan mikro ataukah hanya dinikmati oleh kelompok usaha besar.

6. Appropriateness (ketepatan atau kelayakan). Criteria ini erat sekali hubungannya dengan rasionalitas substantif sebab pertanyaan tentang ketepatan atau kelayakan suatu program atau proyek tidak berkenaan dengan satuan criteria individu melainkan dua atau lebih criteria secara bersama- sama. Ketepatan atau kelayakan program dan proyek menunjuk pada nilai atau harga dari tujuan program atau proyek dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan – tujuan tersebut sebagaimana terpapar dalam matriks program / proyek (logika kerangka kerja program). Criteria ketepatan atau kelayakan tidak dapat didefinisikan secara baku karena dimaksudkan untuk mnjangkau keluar criteria yang sudah ada. cara terbaik untuk menentukan criteria ini ialah dengan menggabung – gabungkan sejumlah criteria lain, misalnya criteria keadilan dan efisiensi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan, dsb.

2.9 Konsep Evaluasi Dampak Program

Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata. Kalimat “usaha untuk menentukan” digunakan dalam pembahasan ini karena evaluasi dipahami sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang sebenarnya dari kebijakan, suatu tugas yang sebenarnya sangat kompleks dan sulit (Anderson dalam Winarno 2007:231). Secara minimum, tujuan evaluasi kebijakan adalah mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (tujuan-tujuan tertentu), bagaimana melakukannya (program-program), dan jika ada, apakah telah mencapai tujuan-tujuan (dampak atau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Disamping itu, dalam mengukur pencapaian kebijakan tidak hanya perubahan yang telah terjadi di kehidupan nyata, seperti misalnya pengurangan angka pengangguran, tetapi juga bahwa perubahan itu disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti misalnya diakibatkan oleh keputusan-keputusan ekonomi swasta. Dalam evaluasi dampak program juga harus dicermati bahwa dampak yang terjadi betul-betul sebagai akibat dari program yang sedang dievaluasi, bukan dampak dari program lain (Subarsono 2005:129).

Sekalipun dampak yang sebenarnya dari suatu kebijakan mungkin sangat jauh dari yang diharapkan atau diinginkan, tetapi kebijakan tersebut pada dasarnya mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat. Misalnya, suatu program anti-kemiskinan barangkali mempunyai hasil yang mengecewakan, akan tetapi kebijakan seperti ini menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah mempunyai perhatian terhadap kemiskinan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dibutuhkan cara ilmiah yang dapat digunakan untuk memperoleh data dan sebagai sarana untuk menemukan jawaban dari suatu masalah sehingga hasil penelitian nantiya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono (2010:6), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, diemangan dan dibuktikan.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian
2. Tipe Penelitian
3. Tempat dan Waktu Penelitian
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Penentuan Informan
6. Metode Analisis Data
7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

3.1 Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti memiliki permasalahan yang luas dan untuk menelitinya membutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu, dalam suatu penelitian membutuhkan fokus penelitian yang memberi batasan agar peneliti dapat fokus pada hal diteliti, sehingga memudahkan penelitian dalam melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2013:32), batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Pada penelitian ini, penulis akan mengevaluasi dampak program pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran KUR yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia kepada UMKM. Fokus penelitian ini membatasi pada evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan awal adanya KUR di desa Sumber Lesung pada tahun 2011 s.d tahun 2014. Selanjutnya

peneliti lebih memfokuskan penelitian di Desa Sumber Lesung, di karenakan penyaluran KUR terbanyak pada tahun 2011 ada di Sumber Lesung.

Samodra Wibawa (1994:54-60) menjelaskan tentang dampak kebijakan menurut unit – unit social yang terdiri dari dampak individu, dampak organisasional, dampak terhadap masyarakat dan dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Dalam hal ini dampak yang sesuai dengan penelitian ini adalah dampak terhadap individu karena pelatihan kerja ini diikuti oleh individu dan juga berdampak pada individu.

3.2 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006:4) menyatakan,

“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan.”

Sedangkan menurut Sugiyono (2013:1), metode penelitian kualitatif adalah:

“Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

Dengan penjelasan tersebut maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti mendeskripsikan program pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Meliputi kegiatan-kegiatan pemberdayaan, hasil dari kegiatan pemberdayaan dan faktor-faktor yang

mempengaruhi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan UMKM di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

3.3 Tempat dan waktu penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai obyek penelitian, dimana tempat penelitian ini akan dilakukan. Peneliti melakukan penelitian di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember karena pada tahun 2011 BRI membuka unit BRI di Kecamatan Ledokombo. Selanjutnya pada tahun 2011 debitur KUR terbanyak ada di Desa Sumber Lesung.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2009:174). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi: 1) teknik observasi; 2) teknik wawancara; 3) teknik dokumentasi; dan 4) studi kepustakaan.

1. Observasi (pengamatan), menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2011:226) mengklasifikasikan observasi menjadi tiga macam yaitu observasi partisipasi (*participant observation*), observasi secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*) dan observasi yang tidak berstruktur (*unstructured observation*).
 - a. Observasi partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh lebih tajam, lengkap, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang ada.

- b. Observasi terus terang atau tersamar, peneliti dalam melakukan data menyatakan terus terang pada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi. Hal ini menghindari apabila suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan apabila dilakukan secara terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.
- c. Observasi tak berstruktur, observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang diamati. Dalam pengamatan peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih melakukan observasi terus terang atau tersamar, peneliti dalam melakukan data menyatakan terus terang pada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari apabila suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemudian apabila dilakukan secara terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi. Observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data riil di lapangan antara pelaksana dan pihak penerima program KUR. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan mengenai dampak dari Program Kredit Usaha Rakyat di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

- 2. Interview (wawancara), menurut Nazir (2009:193) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Melakukan interview dengan informan yang telah ditetapkan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Menurut Esteborg dalam Sugiyono (2011:233) ada beberapa macam wawancara, yaitu.

- a. Wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan wawancara terstruktur responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.
- b. Wawancara semiterstruktur, tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.
- c. Wawancara tak berstruktur, wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara tak berstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun tapi peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang utama. Dalam wawancara tidak terstruktur atau terbuka, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan yang harus diteliti. Untuk mendapatkan permasalahan yang lengkap, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam obyek penelitian.

3. Dokumentasi, file-file atau dokumen-dokumen yang dapat membantu peneliti dalam mencari data. Studi dokumentasi berupa mencari buku atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pencatatan-pencacatan melalui dokumen-dokumen yang ada berupa data atau laporan tertulis secara langsung dari informasi setempat tentang program KUR.

4. Studi kepustakaan, metode ini merupakan sebuah cara untuk mendapatkan data dengan jalan mempelajari dan memahami bacaan yang terkait dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, dan juga dokumen. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mencari buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparansi data sehingga lebih menyempurnakan penjarangan data dalam lapangan.

3.5 Penentuan informan

Menurut Moleong (2008:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang obyek penelitian bagi peneliti. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim peneliti walaupun hanya bersifat informal. Menurut Sugiyono (2013:50), dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi social tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Selanjutnya, sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman, guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil informan inti yaitu penyalur KUR adalah sebagai berikut.

- a. Nama : Samsul Arifin
Jabatan : Kepala unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Ledokombo

Adapun Nasabah/Debitur yang telah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat antara lain sebagai berikut.

- a. Nama : Bapak Hasan Basri
Bidang Usaha : Toko Bangunan
- b. Nama : Bapak Yoyok
Bidang Usaha : Pedagang Sembako
- c. Nama : Ibu Tutik Farida
Bidang Usaha : Dagang Konfeksi (Pakaian)
- d. Nama : Bapak Heri Prayetno
Bidang Usaha : Warung Bakso
- e. Nama : Bapak Sodik
Bidang Usaha : Pertanian
- f. Nama : Ibu Kiblati
Bidang Usaha : Kerajinan (Kain Perca)

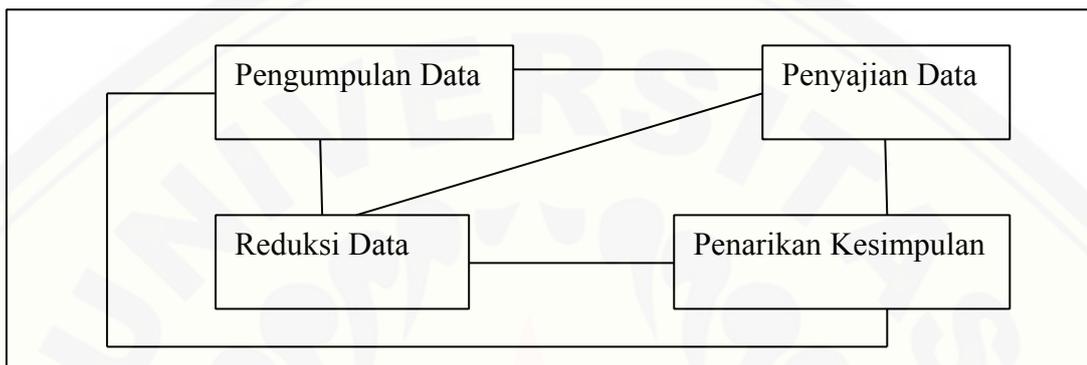
3.6 Metode Analisis Data

Nasution (dalam Sugiyono, 2013:89) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian ini berlangsung. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data kualitatif yang dibuat oleh Miles dan Huberman (1992). Selanjutnya dalam model

tersebut, Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model data ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (Dalam Sugiono, 2011:247)

1. Pengumpulan Data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian (lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data

Untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang senantiasa terus dilakukan selama penelitian berlangsung. Pada tahap ini, peneliti selalu meneliti uji kebenaran terhadap setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen bagan, diklarifikasi kembali baik dengan informan dilapangan baik melalui diskusi dilapangan maupun diskusi dengan pembimbing. Apabila hasil dari klarifikasi dapat memperkuat kesimpulan atas data, maka pengumpulan data untuk komponen itu dapat dihentikan.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah triangulasi. Menurut Moleong (2005:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Denzini (dalam Moleong 2005:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

1. Triangulasi dengan sumber, menurut Patton (dalam Moleong, 2005:330) triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi dengan metode, menurut Patton (dalam Moleong, 2005:331) terdapat dua strategi dalam menggunakan triangulasi metode, yaitu:

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan penyidik, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
4. Triangulasi dengan teori, menurut Patton (dalam Moleong 2005:331) berpendapat bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjas banding.

Berdasarkan penjelasan beberapa macam triangulasi diatas, peneliti memilih munggunakan triangulasi dengan sumber, di mana peneliti nantinya dapat membandingkan antara hasil wawancara dengan sasaran program KUR dan hasil wawancara dengan pelaksana program.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Deskripsi tentang daerah penelitian merupakan suatu gambaran mengenai lokasi atau daerah dimana penelitian itu dilaksanakan. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Deskripsi mengenai daerah penelitian ini, dapat memberikan pandangan serta informasi yang berguna untuk memahami keadaan sebenarnya tentang daerah penelitian sehingga mampu menambah wawasan, pengertian dan memudahkan penjabaran.

Gambaran sepintas mengenai lokasi penelitian ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, diantaranya dapat melakukan pengamatan atau observasi secara langsung dan dapat melalui data sekunder berupa dokumen yang dimiliki oleh instansi terkait. Data sekunder yang diperoleh dapat dijadikan sebagai pembandingan data primer yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

4.1 Kondisi Geografis

Kondisi Geografis adalah keadaan dimana suatu wilayah berdasarkan posisi kenyataannya di permukaan bumi, serta mendeskripsikan penduduk yang menempati wilayah tersebut. Desa Sumber Lesung dengan luas 319.515 Ha tergolong subur untuk pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi yang lainnya. Secara umum Desa Sumber Lesung mempunyai ciri tanah berombak 80% dan tanah datar sekitar 20% dengan suhu berkisar 26° C - 22° C. Dengan pembagian untuk luas lahan pemukiman 112.622 Ha, Lahan untuk pertanian 272.29 Ha, Luas lahan perkebunan 13,927 Ha, dan lahan untuk fasilitas umum seperti tempat rekreasi dan lapangan olah raga 1.2089 Ha. Total luas keseluruhan 406.2480 Ha.

Batas wilayah digunakan untuk menjelaskan letak wilayah yang ada di Desa Sumber Lesung. Secara geografis, batas-batas wilayah Desa Sumber Lesung sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara : Desa Ledokombo
- 2) Sebelah Selatan : Desa Sumber Salak
- 3) Sebelah Timur : Desa Sumber Bulus
- 4) Sebelah Barat : Desa Lembengan

Dalam pembagian wilayah Desa Sumber Lesung terbagi menjadi 5 (lima) Dusun, yaitu:

1. Dusun Krajan
2. Dusun Karang kebun
3. Dusun Karang birih
4. Dusun Lao
5. Dusun Onjur

Aksesibilitas Desa Sumber Lesung menurut data dari profil Desa Sumber Lesung menunjukkan bahwa:

1. Jarak dari Desa Sumber Lesung ke ibu kota Kecamatan Ledokombo adalah 15 Km dengan lama tempuh 20 menit dengan kendaraan bermotor;
2. Jarak dari Desa Sumber Lesung ke ibu kota Kabupaten Jember adalah 30 Km dengan lama tempuh 1 jam dengan kendaraan bermotor;
3. Jarak dari Desa Sumber Lesung ke ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah 250 Km dengan lama tempuh 6 jam dengan kendaraan bermotor;

Jumlah penduduk di Desa Sumber Lesung pada tahun 2013 7.014 jiwa. Sedangkan keadaan penduduk menurut jenis kelamin di Desa Sumber Lesung sebagai berikut;

1. Laki-laki sebanyak 3.478 orang
2. Perempuan sebanyak 3.536 orang
3. Kepala Keluarga sebanyak 2.158 orang

Dalam hal keagamaan, penduduk Desa Sumber Lesung yang beragama Islam 6.995 orang. Dilanjutkan dengan penduduk Desa Sumber Lesung yang beragama Katolik 19 orang, Hindu tidak ada dan Budha tidak ada.

4.1.2 Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan yang di kerjakan untuk biaya sehari-hari. Dengan kata lain struktur mata pencaharian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha pemenuhan kehidupan, dan menjadi pokok penghidupan baginya. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Desa Sumber Lesung, dimana struktur mata pencaharian penduduk Desa Sumber Lesung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumber Lesung Tahun 2013

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	537
2.	Industri/ Kerajinan	21
3.	Konstruksi	323
4.	Perdagangan	343
5.	Angkutan dan Komunikasi	129
6.	Lainnya	169
Total		1.522

Sumber: Profil Desa Sumber Lesung Tahun 2013.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Sumber Lesung adalah pertanian.

4.1.3 Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan manusia. Penduduk Desa Sumber Lesung berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dijabarkan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Rincian Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Sumber Lesung Tahun 2013

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum pernah sekolah	12.44 %
2.	Tidak tamat sekolah dasar	16.4 %
3.	SD/MI	21.48 %
4.	SMP/MTs	6.41 %
5.	SMU/MA	3.98 %
6.	SMK	0.51 %
7.	D-1/2	0.39 %
8.	D-3	0.2 %
9.	D-4/S1	0.86 %
10.	S-2/3	0.01 %
Total		

Sumber: Profil Desa Sumber Lesung Tahun 2013.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Sumber Lesung tamat SD menduduki peringkat pertama dengan jumlah 21.48 %. Selanjutnya Tidak Tamat SD dengan jumlah 16.4 %. Selanjutnya Tidak Sekolah dengan jumlah 12.44 %. Selanjutnya lulusan SMP dengan jumlah 6.41 %. Selanjutnya SMU dengan jumlah 3.98 %. Selanjutnya S1 dengan jumlah 0.86 %. Selanjutnya SMK dengan jumlah 0.51 %. Selanjutnya D1/D2 dengan jumlah 0.39 %. Selanjutnya D3 dengan jumlah 0.2 %. Dan Selanjutnya S2 dengan jumlah 0.01 %.

4.1.4 Sarana dan Prasarana

a. Prasarana Jalan

Jalan raya di Desa Sumber Lesung merupakan jalan yang menghubungkan dengan desa-desa 1 kecamatan atau beda kecamatan di sekitarnya. Oleh karena itu, Desa Sumber Lesung memiliki jalan raya yang cukup baik.

b. Prasarana Transportasi

Desa Sumber Lesung secara geografis merupakan desa yang hampir berada di pucuk timur wilayah Kabupaten Jember. Sarana transportasi yang paling dominan di Desa Sumber Lesung adalah sepeda motor. Kendaraan umum yang ada hanyalah truk.

c. Prasarana Pendidikan dan Agama

Prasarana pendidikan yang ada di Desa Sumber Lesung terdapat 1 Taman Kanak-kanak (TK), 5 SD/ sederajat, tidak ada SLTP/ sederajat. Dan dalam bidang agama di Desa Sumber Lesung terdapat 3 Ponpes, dan 17 TPQ.

d. Prasarana Air Bersih

Berdasarkan Profil Desa Sumber Lesung tahun 2011, prasarana air bersih yang ada di Desa Sumber Lesung adalah sumur terlindung.

e. Prasarana Pemerintah

Prasarana pemerintah adalah sarana yang paling penting, karena merupakan penunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Desa Sumber Lesung. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan data yang diperoleh dari profil Desa Sumber Lesung pada tahun 2013, terlihat bahwa sarana dan prasarana pemerintahan di Desa Sumber Lesung cukup memadai untuk kegiatan pemerintahan. Seperti mesin tik, papan penyajian data, lemari arsip, dan lain sebagainya sudah tersedia.

f. Prasarana Kesehatan

Dalam prasarana kesehatan bagi masyarakat, Desa Sumber Lesung memiliki 1 Puskesmas, 52 Kader posyandu.

g. Prasarana Komunikasi dan Informasi

Dalam prasarana komunikasi dan informasi Desa Sumber Lesung sesuai dengan data profil desa tahun 2013 memiliki 25 prasarana komunikasi yaitu Sambungan Telpon, dan 1.038 Telpom Seluler.

4.1.5 Kualitas Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Desa Sumber Lesung menurut profil Desa Sumberlesung pada tahun 2013 adalah.

- 1) Angkatan kerja tamat SD atau sederajat 36 Orang.
- 2) Angkatan kerja tamat SLTP atau sederajat 393 Orang.
- 3) Angkatan kerja tamat SLTA atau sederajat 1.279 Orang.
- 4) Angkatan kerja tamat perguruan tinggi 1.893 Orang.

4.1.6 Kesejahteraan Penduduk

Dalam hal kesejahteraan penduduk Desa Sumber Lesung pada tahun 2013 dibagi menjadi lima (5) tingkatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kesejahteraan Penduduk Desa Sumber Lesung Tahun 2013

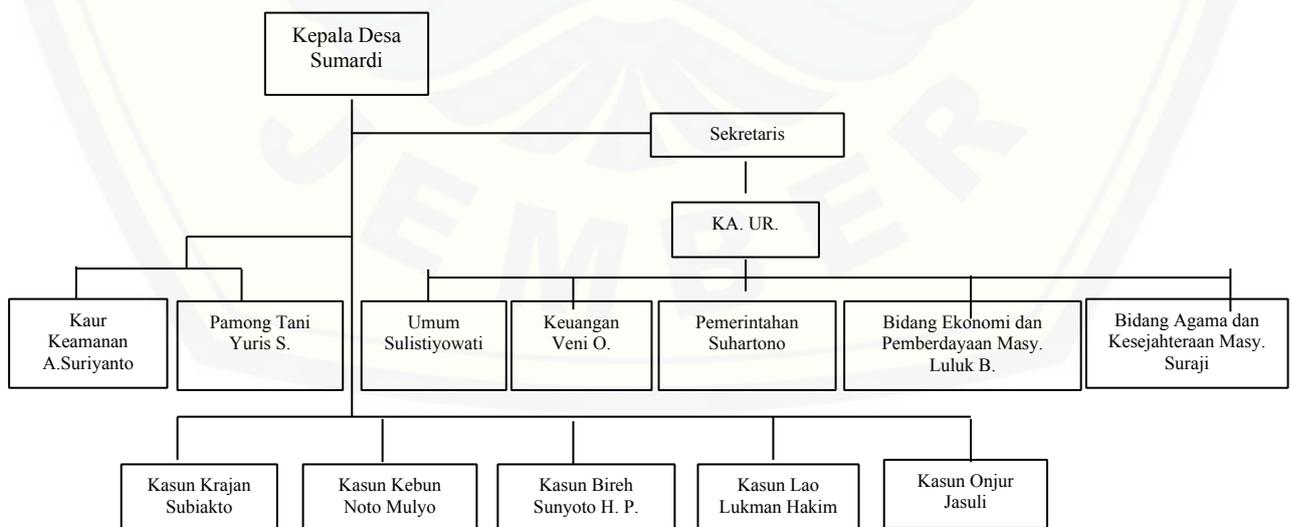
No	Kriteria	Jumlah
1.	Keluarga Pra Sejahtera	843 Keluarga
2.	Keluarga Sejahtera I	878 Keluarga
3.	Keluarga Sejahtera II	459 Keluarga
4.	Keluarga Sejahtera III	198 Keluarga
5.	Keluarga Sejahtera III Plus	31 Keluarga
	Total	2.409 Keluarga

Sumber: Profil Desa Sumber Lesung Tahun 2013

4.1.7 Struktur Organisasi Desa Sumber Lesung

Setiap instansi memiliki struktur organisasi yang berguna sebagai penggerak dalam menjalankan tujuan dan kebutuhan instansi. Dari struktur organisasi tersebut akan terlihat tugas dan fungsi dari masing-masing bagian dalam instansi. Struktur organisasi yang baik akan mempengaruhi jalannya sistem pemerintahan di instansi tersebut dan akan menjadi dasar yang kuat bagi tercapainya sasaran dan tujuan. Demikian juga Desa Sumber Lesung memiliki struktur organisasi pemerintahan guna mengatur masyarakat serta program-program pemerintah yang diterapkan di Desa Sumber Lesung sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumber Lesung



(Sumber: Profil Desa Sumber Lesung tahun 2013)

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Desa dibantu oleh BPD dan LKMD beserta para staf Desa Sumbe Lesung. Rincian nama aparat Desa Sumber Lesung yaitu.

1. Kepala Desa adalah Sumardi.
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah Muzamil.
3. LPMD (Lembaga Pertahanan Masyarakat Desa) adalah Fajar Isnaini.
4. Sekretaris Desa tidak ada.
5. Kepala urusan Umum adalah Sulistiyowati.
6. Kepala urusan Keuangan Veni O.
7. Kepala urusan Pemerintahan Suhartono
8. Kepala urusan Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Luluk B.
9. Kepala urusan Bidang Agama dan Kesejahteraan Masyarakat adalah Suraji.
10. Pamong Keamanan adalah A. Suriyanto.
11. Pamong Tani adalah Yuris S.
12. Kepala Dusun Krajan adalah Subiakto.
13. Kepala Dusun Kasun Kebun adalah Noto Mulyo.
14. Kepala Dusun Kasun Bireh adalah Sunyoto H. P. dan.
15. Kepala Dusun Kasun Lao adalah Lukman Hakim.

4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian Mengenai Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran KUR pada UMKM Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

4.2.1 Kegiatan Pemberdayaan Oleh Pemerintah Melalui PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo

Program pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah melalui PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo dilakukan dengan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia dilingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

4.2.2 Penyaluran KUR Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk merupakan suatu wadah untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan penyaluran KUR. Dalam melaksanakan program Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Salah satunya melalui pemberdayaan UMKM yang bekerja sama dengan melibatkan enam Bank pelaksana, salah satunya yaitu Bank PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk. Dimana dalam program tersebut mempunyai kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu melaksanakan penyaluran KUR sehingga dapat mengembangkan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Penyaluran dilakukan kepada UMKM yang telah ada di Desa Sumber Lesung, penyaluran dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi UMKM dan meningkatkan produktivitas UMKM. Adapun beberapa UMKM yang mendapatkan penyaluran dari PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo adalah.

Tabel 4.4 Daftar UMKM yang mendapat penyaluran KUR

No.	Nama Para UMKM	Bidang Usaha	Tahun Penyaluran	Jumlah kredit	Jangka Waktu
1	Bapak Hasan Basri	Toko Bangunan	2011	5.000.000	1 tahun
2	Bapak Yoyok	Pedagang Sembako	2011	20.000.000	2 tahun
3	Ibu Tutik Farida	Dagang Konfeksi (Pakaian)	2012	10.000.000	2 tahun
4	Bapak Heri Prayetno	Warung bakso	2012	5.000.000	1 tahun
5	Bapak Sodik	Pertanian	2013	10.000.000	2 tahun
6	Ibu Kiblati	Kerajinan (Kain Perca)	2014	5.000.000	1 tahun

Sumber: diolah dari data primer BRI Unit Ledokombo

Berdasarkan tabel di atas, untuk UMKM di Desa Sumber Lesung yaitu pada tahun 2011 dari 15 UMKM yang mendapatkan KUR peneliti mengambil 2 UMKM sebagai informan, Selanjutnya pada tahun 2012 dari 37 UMKM yang mendapatkan KUR peneliti mengambil 2 UMKM sebagai informan. Selanjutnya pada tahun 2013 dari 67 UMKM yang mendapatkan KUR peneliti mengambil 1 UMKM sebagai informan. Selanjutnya pada tahun 2014 dari 69 UMKM yang mendapatkan KUR peneliti mengambil 1 UMKM sebagai informan.

Kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh BRI Unit Ledokombo merupakan penyaluran kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Penyaluran dilakukan kepada UMKM yang memiliki usaha produktif yang usahanya layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan dan belum *bankable*. Dengan bunga yang rendah diharapkan para pengusaha mikro tidak terbebani, karena tujuan Kredit Usaha Rakyat ini pada dasarnya untuk membantu dan menunjang kebutuhan para UMKM. Hal ini dijelaskan oleh informan inti yaitu Bapak Samsul selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo dalam wawancara tanggal 2 Februari 2015 pukul 15.00 WIB yang menyatakan.

“Pemerintah mengeluarkan KUR dengan tujuan untuk membantu kesulitan permodalan UMKM. Jadi, diharapkan UMKM dapat bertahan dari persaingan-persaingan yang ada pada saat ini. BRI siap mengemban tugas besar sebagai Bank pelopor. Kami PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo tugasnya menyalurkan Kredit Usaha Rakyat mas. Jadi kita menjembatani masyarakat untuk mampu menggunakan dan mengaplikasikan penyaluran KUR untuk mengembangkan usahanya”.

Kredit Usaha Rakyat dicanangkan oleh Pemerintah untuk membantu permasalahan yang ada pada UMKM. Permasalahan pada UMKM salah satunya adalah modal usaha, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai pelopor siap membantu untuk memajukan UMKM di Kabupaten Jember khususnya di Kecamatan Ledokombo.

Berdasarkan data yang telah didapatkan dari Bank Pelaksana. Besarnya dana pinjaman (plafon) KUR yang dapat diperoleh UMKM. Untuk Usaha Mikro plafon KUR mulai dari Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 20.000.000. Untuk KUR Ritel (Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi) plafon KUR mulai Rp. 20.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000. Adapun rincian besarnya dana pinjaman/ plafon untuk Usaha Mikro, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.5 Angsuran Kredit Berdasarkan Plafond Kredit dan Jangka Waktu Kredit

Plafond	Jangka Waktu Kredit	
	12 Bulan	24 Bulan
	Bunga = 1.025%	Bunga = 1.02%
1.000.000	10.200	10.200
2.000.000	20.500	20.400
3.000.000	37.500	30.600
4.000.000	41.000	40.800
5.000.000	51.250	51.000
6.000.000	61.500	61.200
7.000.000	71.750	71.400
8.000.000	82.000	81.600
9.000.000	92.250	91.800
10.000.000	102.500	102.000
11.000.000	112.750	112.200
12.000.000	123.000	122.400
13.000.000	133.250	132.600
14.000.000	143.500	142.800
15.000.000	153.750	153.000
16.000.000	164.000	163.200
17.000.000	174.250	173.400
18.000.000	184.500	183.600
19.000.000	194.750	193.800
20.000.000	205.000	204.000

Sumber: diolah dari data primer BRI Unit Ledokombo

Tabel angsuran kredit tersebut di atas biasanya diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah yang sudah mengambil kredit. Tujuannya adalah untuk memudahkan pihak nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran, sebagai promosi bahwa cicilan rendah dan bunga rendah. Selain itu juga, nasabah dapat mengevaluasi jumlah angsuran yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo. Berdasarkan kutipan wawancara dengan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo dalam wawancara tanggal 2 Februari 2015 pukul 15.00 WIB yang menyatakan.

“Pengucuran dana KUR didasarkan pada besar kecilnya usaha yang dimiliki nasabah. Penentuan kredit diterima atau ditolak merupakan hak mutlak pihak Bank. Pemilihan produk didasarkan oleh pertimbangan kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak Bank”.

Dengan adanya berbagai produk yang ditawarkan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo diharapkan para UMKM dapat memilih produk sesuai kemampuan dan keinginan. Besar kecilnya UMKM juga menentukan besar kecilnya jumlah kredit yang dikucurkan oleh pihak Bank. Dengan adanya prosedur yang ditetapkan maka dapat diseleksi debitur yang berhak mendapatkan KUR berupa modal usaha.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak internal yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo, selanjutnya melakukan wawancara kepada nasabah secara langsung. Terdapat 6 Debitur Kredit Usaha Rakyat yang bersedia diwawancarai oleh peneliti. Untuk memadukan pernyataan yang telah disampaikan oleh pihak Bank maka dilakukan wawancara dengan pihak eksternal yaitu nasabah mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat yaitu Bapak Hasan Basri yang memperoleh kredit sebesar Rp. 5.000.000 dengan kutipan hasil wawancara hari Sabtu, 7 Februari 2015 pukul 11.30 WIB sebagai berikut.

“Bank menyarankan untuk mengajukan kredit sebesar Rp. 5.000.000. Dengan proses yang tidak sulit hanya berupa dokumentasi hasil foto usahanya. Cicilannya rendah, sehingga akan cepat melakukan pelunasan kredit”.

Hal senada disampaikan pula oleh Bapak Yoyokhasil wawancara hari Minggu, 8 Februari 2015 pukul 11.30 WIB yang menyatakan.

“Saya telah 2x mendapatkan Kredit Usaha Rakyat, yang pertama Rp. 5.000.000 dan yang kedua Rp. 20.000.000 dengan jangka waktu dua tahun. Untuk kredit yang kedua merupakan tawaran dari pihak Bank”.

Para UMKM merasa terbantu dengan proses yang mudah dan hasil maksimal. Hanya dengan foto dokumentasi hasil usaha dari UMKM. Pemilihan kredit, khususnya untuk KUR yang disarankan oleh pihak Bank mempermudah UMKM untuk menikmati fasilitas yang telah di berikan Pemerintah yang ada dalam produk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo sebagai penyalur KUR.

Berdasarkan hasil wawancara dengan UMKM selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kecenderungan KUR yang banyak diminati adalah Rp. 5.000.000 dan Rp. 20.000.000. Harapan Bank, para UMKM mampu mempertimbangkan kredit khususnya KUR yang dipilih agar tidak membebani UMKM dalam membayar angsuran. Sesuai dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 8 tentang perbankan yang berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang dijanjikan.

4.2.3 Gambaran Penyaluran KUR pada UMKM di Desa Sumber Lesung

Langkah-langkah dalam prosedur Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Prosedur administrasi pendaftaran permohonan kredit

Dokumen-dokumen dan formulir pendaftaran yang diperlukan pada saat pendaftaran permohonan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah mendatangi deskman dengan membawa kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain:
 1. Foto copy KTP masing-masing 1 lembar;
 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar;
 3. Membawa agunan baik barang gerak atau tidak bergerak;
 4. Surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar warga kelurahan tersebut dan agunan yang dibawa olehnya adalah benar miliknya.

Semua persyaratan tersebut dikumpulkan menjadi satu untuk dimasukkan dalam Berkas Calon Nasabah (BCN).

- b. Deskman memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan kredit dan kelengkapan-kelengkapan dokumen dari nasabah.
- c. Deksman mengisi formulir Surat Keterangan Permohonan pinjaman (SKPP) untuk Kredit usaha Rakyat.
- d. Deksman membuat bukti Tanda Terima Jaminan (TTJ) rangkap 2 asli untuk nasabah dan salin untuk arsip.
- e. Deksman mengisi register 35 untuk mendapatkan nomor urut dan nomor pangkal dan register 35 CA untuk mendapatkan nomor pinjaman.
- f. Setelah mencatat register 35 dan register 35 CA maka deksman membuat Tanda Terima Jaminan (TTJ) rangkap 2 asli untuk nasabah dan salinan untuk arsip.
- g. Deksman menyerahkan semua berkas SKPP yang telah terkumpul kepada kepala unit.

Keterangan, Register 35 adalah entry data yang dilakukan bank untuk memperoleh nomor urut dan nomor pangkal. Register 35 CA adalah entry data dilakukan bank untuk memperoleh nomor pinjaman.

2. Administrasi Pemeriksaan Calon Nasabah Dan Usulan Putusan Kredit
Pemeriksaan dilakukan oleh Mantri melalui wawancara secara langsung dengan calon nasabah, atas hasil wawancara tersebut maka Mantri

memberikan usulan putusan kredit, langkah-langkah, dokumen-dokumen, dan formulir-formulir yang diperlukan pada saat pemeriksaan calon nasabah dan usulan putusan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepala unit menerima berkas-berkas dan SKPP dari Deskman kemudian Kepala Unit memeriksa isi berkas SKPP dan membutuhkan tanda *Trik Mark*, setelah diperiksa dikembalikan kepada Deksmen.
 - b. Deskman menerima berkas-berkas dan SKPP dari Kepala Unit kemudian mencatat pada register 35 B dan register 35 untuk mencatat tanggal penyerahan SKPP pada Mantri
 - c. Mantri melakukan pemeriksaan kembali isi SKPP dan BCN kemudian melakukan penilaian agunan dan mengisi pada M 71-78 A serta wawancara langsung kepada calon nasabah untuk mendapatkan data sebagai analisa setelah mantra mencantumkan usulan putusan kredit pada formulir SKPP yang nantinya akan diputuskan oleh Kepala Unit.
 - d. SKPP dan formulir-formulir yang telah diisi oleh Mantri diserahkan kepada Deskman.
 - e. Deskman mencatat tanggal penerimaan SKPP, BCN dan formulir usulan putusan kredit pada register 35 dan selanjutnya menyerahkan SKPP, BCN dan formulir kepada Kepala Unit.
3. Administrasi Putusan Kredit
- Putusan Kredit Usaha Rakyat dilakukan oleh Kepala Unit yang nantinya akan menentukan apakah calon tersebut akan mendapat kredit atau tidak. Langkah-langkah, dokumen, dan formulir-formulir yang diperlukan pada saat putusan kredit adalah sebagai berikut:
- a. Kepala unit memeriksa dan meneliti hasil usulan putusan kredit yang dibuat oleh Mantri.
 - b. Kepala unit membuat keputusan, SKPP beserta berkas-berkas yang lain diserahkan kembali kepada Deskman.
 - c. Setelah Kepala Unit memberikan keputusan apakah tersebut layak atau tidak diberik kredit.

- d. Deskman melakukan pemberitahuan kepada nasabah tentang hasil keputusan tersebut. Bila permohonan kredit tersebut ditolak maka deskman memberitahukan kepada nasabah bahwa permohonan kreditnya telah mendapat persetujuan lalu deskman mencatat register 35 kolom registrasi.
- e. Deskman melakukan pengetikan:
 - a. Surat perjanjian pemberian kredit yang menggunakan materai Rp. 6000,-
 - b. Kwitansi rangkap 3, salinan pertama yang bermaterai Rp. 600,- untuk Teller, salinan kedua untuk deskman disimpan dalam berkas serta pengisian buku besar dengan cara komputerisasi, dan salinan ketiga untuk nasabah.
 - f. Deskman menyerahkan semua isi berkas kepada Kepala Unit.
 - g. Kepala Unit memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas kredit dan membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar pada kwitansi realisasi. Selanjutnya, kwitansi realisasi tersebut diserahkan pada Teller dan berkas kredit diserahkan kepada deskman.
 - h. Deksman menyimpan berkas SKPP sebagai arsip.
4. Administrasi Realisasi Kredit.

Pada saat realisasi Kredit kepala Unit memberikan fiat bayar kepada Teller untuk melakukan pembayaran kepada nasabah. Langkah-langkah, dokumen-dokumen formulir yang diperlukan pada saat keputusan kredit adalah sebagai berikut:

 - a. Teller menerima dan meneliti keabsahan kwitansi realisasi dari Kepala Unit.
 - b. Teller memanggil nasabah dan meminta nasabah membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada halaman depan. Setelah yakin bahwa yang akan menerima pembayaran adalah yang berhak maka Teller memvalidasi pada program computer.
 - c. Salinan pertama yang bermaterai Rp. 6000,- untuk Teller, salinan kedua diserahkan kepada deskman dan salinan ketiga untuk nasabah.

- d. Deskman melakukan pengisian pada buku besar melalui komputerisasi.
 - e. Deskman mencatat tanggal realisasi dan hal-hal mengenai realisasi pada register 35 DA.
 - f. Setelah pencatatan pada register 35 DA semua berkas termasuk kwitansi realisasi disimpan dalam almari terkunci.
5. Administrasi Pembayaran Angsuran kredit.

Angsuran Kredit Usaha Rakyat dilakukan oleh nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Unit yang bersangkutan dan mengisi formulir setoran tunai dibantu oleh deskman. Langkah-langkah, dokumen-dokumen dan formulir yang diperlukan pada saat pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mendatangi Deskman dengan membawa setoran sebelumnya dan kwitansi realisasi.
- b. Deskman mengisi formulir setoran tunai yang dibuat rangkap dua, asli untuk Teller dan salinan untuk nasabah.
- c. Deskman meminta nasabah membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir setoran tunai.
- d. Nasabah menyerahkan tanda formulir setoran tunai dan uangnya kepada Teller.
- e. Teller memeriksa kebenaran pengisian formulir setoran tunai dan mencocokkan jumlah uang yang tertera pada formulir setoran tunai.
- f. Teller memberikan stempel dan menandatangani.
- g. Teller memvalidasi formulir setoran tunai pada computer.
- h. Teller menyerahkan salinan formulir setoran tunai kepada nasabah dan aslinya diserahkan pada deskman untuk diverifikasi.

Selanjutnya, Peneliti melakukan wawancara kepada UMKM secara langsung terkait tentang persyaratan dan prosedur pengajuan kredit. Kelima nasabah Kredit Usaha Rakyat cenderung menjawab sama. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan penerima Kredit Usaha Rakyat. Kutipan wawancara dengan Hasan Basri hari Sabtu, 7 Februari 2015 pukul 11.30 WIB sebagai berikut.

“Persyaratan KUR dari BRI relatif tidak sulit hanya diperlukan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), surat dari desa atau kelurahan, dan foto suami istri. Selain persyaratannya yang relatif mudah, prosesnya pun cepat dan juga pencarian dana KUR hanya memerlukan waktu selama dua hari. Untuk permasalahan denda, dendanya hanya dihitung apabila sudah melewati bulan waktu pembayaran”.

Kemudahan prosedur pengajuan kredit juga disampaikan oleh informan yang lain. Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan HN hari Minggu, 8 Februari 2015 pukul 11.30 WIB sebagai berikut.

“Prosedur kredit sudah tertera dalam tabel yang diberikan oleh Bank. tabel tersebut berisi tentang persyaratan pengajuan kredit. Selanjutnya, prosedur yang harus dilalui Bank adalah melakukan dokumentasi mengenai usahanya. Setelah itu pihak Bank memberikan informasi agar nasabah mengisi formulir-formulir yang telah disediakan oleh Bank. Prosesnya sangat cepat dan keuntungan nasabah tidak perlu berbelit-belit dalam proses administrasi persyaratan kredit”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti memberikan kesan bahwa Kredit Usaha Rakyat ini persyaratannya relatif mudah prosesnya cepat, dan pencairan dana KUR hanya memerlukan waktu selama dua hari, sehingga diharapkan para UMKM tertarik dengan adanya kredit ini. Dengan adanya prosedur yang mudah dapat memberikan keuntungan pada kedua belah pihak, yaitu pada pihak Bank dan pihak umkm. Pihak Bank dapat memantau lebih cermat dan dapat mengetahui secara pasti kondisi nasabah sebenarnya. Keuntungan pihak nasabah, dengan adanya prosedur yang mudah dan tidak berbelit-belit nasabah tidak perlu repot dengan administrasi persyaratan pengajuan kredit.

4.2.4 Dampak Penyaluran KUR pada UMKM di Desa Sumber Lesung

Sebagaimana yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini, bahwa menurut Subarsono (2005:121), evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.

a. Dampak Positif

Tingkat efektifitas Kredit Usaha Rakyat dapat diketahui peneliti dengan melakukan wawancara kembali dengan Kepala Unit yaitu Bapak Samsul mengenai dana KUR ini efektif atau tidak dalam wawancara sebagai berikut.

“Barometer/acuan Krdit usaha Rakyat itu efektif atau tidak terlihat dari beberapa hal diantaranya. Peratama, pembayaran angsuran yang tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit. kedua, pembayaran angsuran itu adalah hasil/laba dari meningkatnya volume penjualan usaha mikro. Ketiga, dana yang dicairkan/dikucurkan sesuai penggunaannya dengan tujuan yang ditetapkan oleh pihak Bank”. (Kutipan hasil wawancara hari senin, 2 Februari 2015 pukul 15.35 WIB)

Beberapa hal yang telah dijabarkan diatas maka pihak bank selalu melakukan pengawasan kepada UMKM secara berkala dapat dilakukan tiap bulan atau 3 bulan sekali bahkan 6 bulan sekali, tergantung kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi UMKM. Selain itu juga melakukan sharing mengenai kendala-kendala yang ada. Bank juga melihat tingkat efisiensi penggunaan dana Kredit Usaha Rakyat dengan laporan keuangan, laporan produksi dan asset yang dimiliki oleh UMKM. Pemantauan atau pengawasan yang dilakukan hanya berupa kunjungan ditempat, kadang-kadang mereka melakukan pembayaran melalui kantor BRI Unit Ledokombo.

Adanya Kredit Usaha Rakyat yang diberikan oleh Pemerintah kepada UMKM lewat program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi diharapkan dapat memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, kemudian meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha dari UMKM. Selain itu, dari adanya KUR bagi UMKM adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh bapak Hasan Basri selaku pemilik toko bangunan (gamping) dalam wawancara sebagai berikut.

“Itu mas kalau KUR ini bunganya lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang lain, cuman jangka waktunya pendek. kemudian ngurusnya mudah dan cairnya cepat. Kemudian sebelum

mendapat KUR saya biasanya labanya Rp. 50.000 mas, kalau setelah mendapatkan KUR meningkat kurang lebih Rp. 100.000 mas. Sehingga sisa lebihnya bisa saya gunakan untuk dana cadangan”. (Kutipan hasil wawancara hari Sabtu, 7 Februari 2015 pukul 11.50 WIB).

Pernyataan di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Yoyokselaku pemilik toko sembako dalam wawancara sebagai berikut.

“Ya kurang lebih dulu sebelum dapat kredit Rp. 50.000 mas, karena sekarang barang dagang sudah semakin variatif otomatis naik mas ya kurang lebih Rp. 75.000 perhari mas. Dan dana ini digunakan sebagai modal kerja tambahan agar barang yang dijual lebih bervariasi sehingga memperoleh laba yang lebih besar. (Kutipan hasil wawancara hari Minggu, 8 Februari 2015 pukul 12.00 WIB).

Perolehan dana Kredit Usaha Rakyat digunakan sesuai dengan kebutuhan para usaha. Hal tersebut terbukti dengan semakin bertambahnya kesadaran nasabah untuk mengembangkan usahanya. Nasabah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga penggunaannya sangat bervariasi namun tetap pada fungsi masing-masing sebagai modal kerja dan investasi. Selanjutnya dampak positif juga masih dirasakan dengan oleh debitur sebagai tambahan modal. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Tutik Farida selaku pengusaha Dagang Konfeksi (pakaian) dalam wawancara sebagai berikut.

“Begini mas, ini memang saya gunakan untuk modal kerja. Saya nambah dagangan saya, soalnya kalau bisnis baju begini harus mengikuti zaman mas. Alhamdulillah modal usaha saya bertambah, apalagi sekarang sudah ada yang menjalankannya keliling mas”. (Kutipan hasil wawancara hari Minggu, 8 Februari 2015 pukul 13.40 WIB).

Pernyataan di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Heri Prasetyoselaku pemilik Warung Bakso dalam wawancara sebagai berikut.

“Ini saya puter dananya mas sebagian buat tambahan modal jualan dan sebagian buat benahin rumah saya mas. modal saya gak mesti meningkat naik turun mas, namanya juga orang dagang mas. (Kutipan hasil wawancara hari Sabtu, 14 Februari 2015 pukul 11.40)

Berdasarkan informasi di atas, dampak positif menghasilkan tambahan modal buat para debitur KUR. Selanjutnya dari penambahan modal para debitur dampak positif menghasilkan lapangan kerja dan jam kerja. Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Sodik selaku Usaha Pertanian dalam wawancara sebagai berikut.

“kita itukan kerja bukan berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan luas tanah yang dikerjakan. Ya secara otomatis kalau luas tanahnya bertambah secara otomatis waktunya juga akan bertambah, pekerjaannya bertambah. yang biasanya garap cuman setengah hektar dengan modal itu meningkat otomatis lahan itu harus kita tambah dengan cara ntah itu sewa, dan juga mengajak orang lain lagi untuk membantu pekerjaannya”. (Kutipan hasil wawancara hari Minggu, 22 maret 2015 pukul 18.55 WIB).

Pernyataan di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Kiblati selaku pemilik usaha Kerajinan (kain perca) dalam wawancara sebagai berikut.

“Iya mas jam kerja juga bertambah, soalnya kita harus cari cara biar bisa balikin modal dan bayar hutang”. (Kutipan hasil wawancara hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 18.50).

Dari hasil wawancara di atas, dampak positif adanya KUR dengan bertambahnya bidang usahanya secara otomatis pekerjaannya bertambah sehingga bisa mengajak orang lain mmbuka lapangan pekerjaan dan membantu mengerjakannya. Selanjutnya para debitur juga harus mencari cara untuk mengembalikan pinjaman KUR tersebut.

b. Dampak Negatif

Kredit Usaha Rakyat ini juga mempunyai dampak negatif bagi para UMKM, yakni tidak memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar melainkan di gunakan untuk keperluan yang lain. Sehingga penyalah gunaan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan itu semula untuk produksi, kenyataannya dalam perjalanan itu dipakai untuk konsumsi bukan untuk investasi, berarti tidak sesuai dengan tujuan program KUR. Adapun kendala-kendala yang sering terjadi adalah banyak nasabah atau UMKM yang salah mengartikan bahwa Kredit Usaha

Rakyat ini bebas untuk siapa saja, padahal haruslah UMKM yang memiliki usaha minimal 6 bulan sampai 1 tahun berjalan. Harapan pihak bank, bank dapat membantu permodalan UMKM yang telah memiliki usaha bukan untuk membuat atau membangun usaha baru. Oleh karena itu, diharapkan dana yang telah dikucurkan itu bias tepat guna (efektif).

Dampak negatif pada pinjaman ke pihak lain. Yaitu ketergantungan kedua pada pihak lain (rentenir). Sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak Sodik yang usahanya dari pertanian dalam wawancara sebagai berikut.

“Iya kredit lain iya, ada yang kredit koperasi dengan bunga yang lebih tinggi. Mau gimana lagi mas, soalnya kalau butuh dana kepepet kita larinya ke koperasi mas. Istilahnya kalau kayak di pertanian ini ya seperti harga gabah sekarang lagi turun kita ya rugi mas. Jadi kita pinjem ke koperasi buat dana tambahan dan dana cadangan”. (Kutipan hasil wawancara hari Minggu, 22 Maret 2015 pukul 18.40 WIB).

Pernyataan di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Kibliti selaku pemilik kerajinan (kain perca) dalam wawancara sebagai berikut.

Oh iya pernah mas, ini saya baru ngambil kredit mas di koperasi maharani itu juga karena kepepet mas. Iya memang bunganya sedikit lebih tinggi. Tapi nggak papa, soalnya saya pakai buat tambahan kerajinan ini”. (Kutipan hasil wawancara hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 18.35 WIB).

Berdasarkan informasi di atas, Sebenarnya bukan untuk hal yang investasi yaitu bukan memberikan keuntungan untuk usahanya, tetapi untuk menutup pinjaman. Jadi Kredit Usaha Rakyat masih menunjukkan masih ada gejala belum mampu mengangkat ketergantungan sama pihak lain atau rentenir.

4.2.5 Volume Penjualan Para UMKM Setelah Mendapatkan KUR

Dapat diketahui Usaha Toko Bangunan yang dikelola oleh Bapak Hasan Basri selama kurang lebih kurun waktu 10 tahun mencapai perkembangan volume penjualan yang pesat berawal dari laba perhari Rp. 50.000 menjadi Rp. 100.000 setelah mendapatkan Kredit Usaha rakyat.

Toko Sembako milik Bapak yoyok, penjualan took sembako ini juga pesat terlihat dari volume penjualan yang meningkat. Jika dilihat volume penjualan took sembako ini paling banyak, karena pada hakekatnya penjualan ini dibutuhkan oleh masyarakat. Orang pasti membutuhkan kebutuhan sembako tiap hari. Untuk prospek jangka panjang took ini cukup menjanjikan. Oleh karena itu Bapak Yoyok mendapatkan kepercayaan dari bank, untuk melakukan kredit. semula kredit yang dikururkan Rp. 5.000.000, untuk kredit yang selanjutnya Bapak Yoyok meminjam KUR sebesar Rp. 20.000.000. Bapak Yoyok juga tidak pernah terlambat membayar angsuran, sangat terlihat bahwa sirkulasi keuangan Bapak Yoyok berjalan lancar.

Dagang konfeksi (pakaian) yang dikelola oleh ibu Tutik Farida, walaupun tempatnya jika dilihat dari luar tidak terlalu besar, namun prospek penjualannya sangat pesat. Pemasaran yang dilakukan oleh ibu Tutik farida ini selain membuka took pakaian di sebelah rumahnya. Ibu tutik farida juga mempunyai reseller tetap yang menjualkan produknya melalui kredit. jadi, volume penjualannya juga meningkat pesat. Kendala yang dihadapi adalah trend mode yang sangat cepat berubah, sehingga mengharuskan penjual update. Untuk stok lama hanya dijual lebih murah dengan memberikan diskon. Karena harga baju yang beraneka ragam estimasi harga baju sekitar Rp. 40.000 sampai dengan Rp. 50.000 dan laba perbaju bias Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 13.000. apabila harga kredit bias mendapatkan laba yang lebih besar, namun juga perputaran keuangannya lambat.

Bapak Heri prayetno pemilik warung bakso, jika dilihat volume penjualandari laba bapak heri prayetno tidak meningkat hal tersebut disebabkan penggunaan dana tambahan tersebut digunakan untuk membenahi warungnya. Sehingga laba perbulannya sama dari sebelum dan sesudah mendapatkan kredit.

Berdasarkan ketiga UMKM tersebut menunjukkan adanya volume penjualan meningkat secara efektif, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan dana Kredit Usaha Rakyat efektif. Sebab, bermula dari sebelum mendapatkan kredit dan sesudah mendapatkan kredit bank selalu memberikan control berupa pengawasan.

4.2.6 Keberlanjutan Program Kredit Usaha Rakyat

Sebagaimana yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini, bahwa menurut Anderson dalam Santosa (2012:45) evaluasi dapat merupakan awalan (*restart*) dalam proses kebijakan. Karena itu, evaluasi dapat memberikan pedoman untuk mengubah atau menghapus suatu kebijakan.

Suatu kebijakan dikatakan layak untuk dipertahankan dan perlu untuk terus dilanjutkan adalah dengan alasan bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat atau kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik, serta kebijakan berdampak positif bagi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut memang harus tetap dipertahankan dan pantas untuk diteruskan. Disisi lain, suatu kebijakan perlu untuk dihentikan apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat/Debitur KUR atau dengan kata lain kebijakan Pemerintah tersebut tidak memihak kepada masyarakat. Selain itu, suatu kebijakan dapat dihentikan apabila dalam tataran pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dasar hukum yang berlaku dan juga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya atau dampak yang dihasilkan dari suatu kebijakan tidak mencapai hasil yang optimal bagi kepentingan masyarakat/Debitur KUR.

Untuk mengukur apakah program Kredit Usaha Rakyat layak untuk dipertahankan atau dihentikan adalah dengan menggali informasi dari Debitur penerima Kredit Usaha Rakyat apakah program Kredit Usaha Rakyat ini telah sesuai dengan tujuan atau tidak, sehingga dapat diketahui apakah program Kredit Usaha Rakyat ini perlu diteruskan atau dihentikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa, sebagian besar penerima Kredit Usaha Rakyat menyatakan program ini perlu dilanjutkan dan sebagian kecil menyatakan program ini tidak perlu dilanjutkan karena dinilai hanya para pemilik usaha yang usahanya produktif saja yang bisa mengajukan Kredit Usaha Rakyat ini. Sebagaimana yang terpetik dalam wawancara dengan Bapak Hasan Basri sebagai berikut.

“Menurut saya perlu untuk dilanjutkan mas, karena cukup membantu untuk usaha saya mas. Karena perannya cukup besar untuk perputaran modal kita. (Kutipan hasil wawancara hari Sabtu, 7 Februari 2015 pukul 11.50 WIB).

Pernyataan di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ibuk Tutik Farida pemilik toko pakaian dalam wawancara sebagai berikut.

“Menurut saya perlu dilanjutkan mas.Sangat besar dan sangat membantu karena dengan adanya KUR ini, kami usaha mikro tidak perlu kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan, karena terkadang orang yang punya usaha ini pasang surut mas.Jika untuk ya Alhamdulillah, namun apabila tidak untung modalnya habis”.(Kutipan hasil wawancara hari Minggu, 8 Februari 2015 pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat ini dinilai layak dipertahankan dan perlu untuk tetap dilanjutkan karena program Kredit Usaha Rakyat dianggap sudah memihak kepada masyarakat/Debitur, khususnya Debitur penerima KUR meskipun dalam pelaksanaannya masih ada penerima KUR yang memakai dana KUR ini dengan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan tujuan dari adanya program Kredit Usaha Rakyat ini. Maka keberadaan program Kredit Usaha Rakyat juga masih sangat dibutuhkan khususnya oleh Debitur di Desa Sumber Lesung.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan yang tegas, tidak menimbulkan multi-tafsir, dan merupakan pernyataan akhir penalaran deduktif-deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah universitas Jember, 2012:25). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi dampak program pemberdayaan melalui penyaluran KUR di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyaluran KUR di Desa Sumber Lesung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Debitur yang mengajukan KUR di BRI Unit Ledokombo pada tahun 2011 sebanyak 15 orang, kemudian pada tahun 2012 sebanyak 37 orang, jumlah itu meningkat sebanyak 22 orang dari tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2013 debitur yang mengajukan KUR sebanyak 67 orang, jumlah itu meningkat sebanyak 30 orang dari tahun 2012.
2. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Desa Sumber lesung bahwa kecendrungan debitur KUR yang banyak diminati adalah Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 20.000.000. Harapan Bank, debitur mampu mempertimbangkan KUR mana yang dipilih agar tidak membebani debitur/nasabah dalam membayar angsuran.
3. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat ini persyaratannya relatif mudah prosesnya cepat, dan pencairan dana KUR hanya memerlukan waktu selama dua hari, sehingga diharapkan para UMKM tertarik dengan adanya kredit ini.
4. Perolehan dana Kredit Usaha Rakyat digunakan sesuai dengan kebutuhan para usaha. Hal tersebut terbukti dengan semakin bertambahnya kesadaran nasabah untuk mengembangkan usahanya. Nasabah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga penggunaannya sangat bervariasi namun tetap pada fungsi masing-masing sebagai modal kerja dan investasi. Selanjutnya menghasilkan tambahan modal buat para debitur KUR. Selanjutnya dampak

positif adanya KUR dengan bertambahnya bidang usahanya secara otomatis pekerjaannya bertambah sehingga bisa mengajak orang lain membuka lapangan pekerjaan dan membantu mengerjakannya. Selanjutnya para debitur juga harus mencari cara untuk mengembalikan pinjaman KUR tersebut.

5. Penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan itu menghasilkan dampak negatif, yang semula untuk produksi, kenyataannya dalam perjalanan dipakai untuk konsumsi bukan untuk investasi yang dapat memberikan keuntungan untuk usahanya, berarti tidak sesuai dengan tujuan program KUR. Selanjutnya ada pinjaman ke pihak lain, yaitu ketergantungan kedua pada pihak lain untuk menutupi pinjaman. Jadi Kredit Usaha Rakyat menunjukkan masih ada gejala belum mampu mengangkat ketergantungan sama pihak lain atau rentenir.
6. UMKM tersebut menunjukkan adanya volume penjualan meningkat secara efektif, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan dana Kredit Usaha Rakyat efektif.
7. Keberlanjutan Program Kredit Usaha Rakyat di Desa Sumber Lesung sebagian besar dari debitur ini mengatakan bahwa program KUR ini dinilai layak dipertahankan dan perlu untuk tetap dilanjutkan karena program KUR dianggap sudah memihak kepada masyarakat atau debitur KUR, meskipun dalam prosesnya masih ada penerima KUR yang memakai dana KUR ini dengan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan tujuan dari adanya program KUR ini. Maka keberadaan program KUR juga masih sangat dibutuhkan khususnya oleh Debitur KUR di Desa Sumber Lesung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahaman peneliti selama berada di lokasi penelitian yang berkaitan tentang evaluasi dampak program pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran KUR di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, maka peneliti mengemukakan beberapa saran

untuk program pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran KUR di Desa Sumber Lesung. Adapun saran tersebut adalah.

1. Perlu dilakukan evaluasi atau kunjungan yang berkelanjutan secara periodik untuk memperkecil atau bahkan meniadakan penyimpangan dalam penyaluran KUR. Karena masih banyak debitur KUR tidak menggunakan dana KUR ini sesuai dengan tujuan adanya program KUR.
2. Pemerintah juga perlu melakukan pengawanan terhadap program KUR ini, jadi tidak hanya beban pengawasannya pada Bank pelaksana saja, dikarenakan minimnya waktu yang dimiliki oleh mantri kredit. Sehingga lebih dapat selektif dan tepat sasaran dalam memilih debitur KUR.
3. Adanya pengarahan yang digunakan untuk memotivasi UMKM untuk lebih maju dan meningkatkan usahanya agar tidak tertindas oleh pasar modern yang telah menjamur di pelosok-pelosok desa. Sehingga dapat memotivasi untuk menjadikan UMKM yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA.

- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era global*. Bandung: Alfabeta
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespetif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong.Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong.Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong.Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Aceh Darussalam: Ghalia Indonesia.
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Simanjuntak, Payaman J 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodinigrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suhartono, edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Retika Adi Utama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2010. *Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Jawa Timur*. Jakarta Pusat: sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2010. *Program Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta Pusat: sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Unej.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Wirawan, 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers (Raja Grafindo Grup).

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Perssindo.

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Keputusan Presiden Nomor 190 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Mengenai Kumpulan Peraturan Terbaru Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Internet

<http://www.tnp2k.go.id/id/Tanya-jawab/klaster-iii/Program-Kredit-Usaha-Rakyat-Kur> (diakses tanggal 3 September 2014 pukul 18:59 WIB).

<http://skalanews.com/news/detail/120352/5/Presiden-Targetkan-10-juta-umkmk-penerima-kur.html> (diakses tanggal 4 September 2014 pukul 21:17 WIB)



LAMPIRAN A


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegayuboko Telp. (0331) 335586, 331342. Fax. (0331) 335586
Jember 68121. Email: tsury@jember.ac.id

Nomor : 281/UN05.1.2/CT/2015
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

23 Januari 2015

Yth. Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang akan menyelesaikan Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memperhatikan mahasiswa kami.

Nama : Chandra
NIM : 080910
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Untuk melaksanakan penelitian di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dengan lama penelitian 2 (dua) bulan. Untuk penyelesaian skripsi dengan Masyarakat Melalui Penyakur Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


Drs. Himpawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.
NIP. 1963108281992011001

29 JAN 2015
23

LAMPIRAN B



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lernlit@unej.ac.id

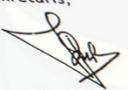
Nomor : /UN25.3.1/LT/2015
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian 30 Januari 2015

Yth. Pimpinan
BRI Unit Ledokombo Kabupaten Jember
di -
JEMBER

Memperhatikan surat Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 0281/UN25.1.2/LT/2015 tanggal 23 Januari 2015, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Chandra Mukti/080910291017
Fakultas / Jurusan : FISIP/Ilmu Administrasi Negara/Unit
Alamat / HP : Jl. Perum Mastrip T-10 Jember/HP
Judul Penelitian : Evaluasi Dampak Program Pembiayaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kecamatan Ledokombo Kabur
Lokasi Penelitian : BRI Unit Ledokombo Kabupaten Jember
Lama Penelitian : Dua bulan (30 Januari 2015)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan.

Mengetahui dan Menyetujui,
Ketua Sekretaris,

Dr. Zainuri, M.Si.,
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

 mutu certification international
 KAI
CERTIFICATE NO. : QMS17

LAMPIRAN C



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepala
Yth. Sdr. Pimpinan BKI Unit Ledokombo Kab.
di - JEMBER

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 072/174/314/2015

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2. Peraturan Bupati Jember No. 62 Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember ter tanggal 10/12/2015 perihal Permohonan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM : Chandra Mukti 0807
Instansi : Jurusan Ilmu Adm. Negara / FISIP / Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul : "Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Rakyat (KUR) di Desa Sumberesung Kasca"
Lokasi : BKI Unit Ledokombo Kabupaten Jember
Tanggal : 05-02-2015 s/d 05-04-2015

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan:
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memurn
Demikian atas perhatian dan kerjasamar

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 05-02-2015

AN. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Bid. Kajian dan Politik



1. Lembaga Penelitian Univ. Jember
2. Yth. Sdr.

Tembusan : 1. Ketu
2. Ars

LAMPIRAN D



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Model 5

KANTOR CABANG JEMBER

UNIT LEDOKOMBO

Jl. RAYA KEPOLISIAN NO 25 SUMBERLESUNG LEDOKOMBO TLP. 0331-562882 FAX. 0331-565222

SURAT KETERANGAN
NO: B. 027 / UNIT/RS/17/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samsul Arifin
Jabatan : Pgs.Ka Unit
Unit Kerja : BKU Unit Ledokombo
Alamat : Jl.Raya Kepolisian No.25 Le

adokombo

Menorangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Chandra Mukti
NIM : 0809102910
Instansi : Jurusan II
Alamat : Jl.Kali

17
mu Adm.Negara/Fisip/Universitas Jember,
mantan No.37 Jember

kan penelitian tentang "Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat
Kredit Usaha Rakyat (KUR) di desa Sumber Lesung Kesamatan Ledokombo
terhitung mulai tanggal 05 Februari 2015 s/d 05 April 2015.

Telah selesai melaksana
Melalui Penyaluran
Kabupaten Jember

arat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikian

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
UNIT LEDOKOMBO



Samsul Arifin
Pgs. Ka unit

Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan Kepada SDM

LAMPIRAN E

Digital Repository Universitas Jember

